

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai dalam kurun waktu 1 (Satu) tahun sampai dengan 5 (Lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan tantangan yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran dan prioritas sasaran dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.

Revisi Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 ini merupakan revisi dari dokumen Renstra sebelumnya yang telah disusun. Hal ini didasarkan pada beberapa faktor dan pertimbangan, antara lain : (i) Adanya revisi penyusunan RPJMD lama yang telah menjadi Perda No. Tahun; (ii) adanya beberapa indikator kinerja yang perlu penyesuaian lebih lanjut; (iii) keperluan penyesuaian lebih lanjut dengan substansi yang telah termuat dalam revisi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

Kemudian penyesuaian kebijakan Indonesia Bersatu dan Kebijakan Prioritas yang termuat dalam Revisi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 yang berpengaruh terhadap pencapaian target pembangunan kelautan dan perikanan Sulawesi Selatan ke depan, dengan agenda pembangunan "**Kemaritiman**" sebagai berikut :

- 1) Peningkatan produksi perikanan dua kali lipat ;
- 2) Peningkatan kapasitas dan pemberian akses terhadap sumber modal sarana produksi, infrastruktur, teknologi dan pasar ;
- 3) Pemberian sarana produksi ;
- 4) Terbangunnya sentra perikanan sebagai tempat pelelangan ikan terpadu ;
- 5) Penerapan Best Aqua Culture prioritas untuk komoditas unggulan ;
- 6) Pengembangan Pelabuhan Perikanan Strategis ;
- 7) Pemberantasan Illegal, Unregulated and Reported Fishing (IUU) ;
- 8) Meningkatnya upaya pengawasan khusus wilayah kelautan guna mencegah illegal Fishing;
- 9) Mengamankan sumberdaya alam dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) ;
- 10) Bertambahnya kawasan konservasi perairan ;
- 11) Rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir dan lautan ;

Revisi Renstra SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 ini merupakan penjabaran visi, misi dan Program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan dalam sisa periode 3 tahun terakhir yaitu untuk tahun 2016 sampai dengan 2018 menyesuaikan dengan Revisi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, penyusunan Revisi Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 berpedoman pada RPJP Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2005 - 2025 dan Revisi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018, memperhatikan sumberdaya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu strategis yang berkembang. Mengingat peran dan fungsi Renstra SKPD Provinsi Sulawesi Selatan sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat maka penyusunan Renstra SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan yang nantinya akan dijabarkan kembali secara lebih teknis di Rencana Kerja (RENJA) Dinas.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
2. Undang – undang 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
4. Undang – undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
5. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
6. Undang – undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil,
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah,
8. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota,
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,

12. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia,
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah,
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 13 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah,
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda No. 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, Nomor 10).
25. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No.40 Tahun 2008 tentang Organisasi

26. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No.41 Tahun 2008 tentang UPTD
27. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No.62 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
28. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No.29 Tahun 2015 tentang Analisis Standar Belanja

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Revisi Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah, (1) untuk menyiapkan rumusan kebijakan dan program strategis dengan skala prioritas yang lebih terarah dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, (2) sebagai pedoman bagi unit kerja lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dalam merumuskan kebijakan dan menjadi acuan bagi instansi terkait di kabupaten/kota dalam mendukung pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, (3) sebagai dasar bagi unit kerja lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan yang diimplementasikan dalam pelaksanaan program kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran .

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah menetapkan langkah yang akan diambil dalam melaksanakan pembangunan Perikanan dan Kelautan Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan dalam bentuk sasaran, strategis, kebijakan dan program kegiatan sebagai tujuan pembangunan Perikanan dan Kelautan Sulawesi Selatan dapat diwujudkan sesuai visi dan misinya.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan berpedoman pada Renstra Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang diimplementasikan melalui dukungan dana yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Strategi yang telah ditetapkan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Revisi Rencana Strategis Pembangunan Perikanan dan Kelautan Propinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2008 - 2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I** Pendahuluan. Bagian ini memuat uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

**Bab II** Gambaran Pelayanan SKPD memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi)Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,

mengulas secara ringkas sumberdaya yang dimiliki, dan kinerja pelayanan melalui pelaksanaan Renstra sebelumnya dan capaian program yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode 2008-2013 serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan.

- Bab III** Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan beserta factor-faktor yang menganalisis isu-isu strategis yang merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan dapat dioperasionalkan dan secara moral serta estetika birokratis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bab IV** Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan memuat uraian tentang visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menggambarkan apa yang diharapkan pada yang akan datang, dan misi yang menggambarkan langkah-langkah utama yang akan diambil untuk mendukung pencapaian visi, serta strategi dan kebijakan.
- Bab V** Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, memuat uraian tentang penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD setempat, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam periode lima tahun dan tahunan, dirinci menurut lokalitas SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan.
- Bab VI** Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, memuat indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**Penutup**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

##### **Tugas dan Fungsi**

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi jabatan pada struktural organisasi lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai PP 41 tahun 2007 adalah sebagai berikut :

##### **1. Tugas Pokok**

###### **a. Kepala Dinas**

Melaksanakan urusan di bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota di bidang kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

###### **a. Sekretaris**

Melaksanakan penyusunan program, urusan keuangan, kepegawaian, urusan umum serta pengendalian dan pengawasan.

##### **1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian**

- Melakukan urusan ketatausahaan dinas meliputi surat menyurat, kearsipan, penggandaan, ekspedisi, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan dan urusan rumah tangga dinas.
- Mengelola administrasi kepegawaian meliputi rencana formasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pengembangan karir dan kesejahteraan pegawai.

##### **2. Sub. Bagian Program**

- Melakukan analisis, evaluasi dan penyiapan bahan , perumusan rencana program dan kegiatan.

##### **3. Sub. Bagian Keuangan**

- Mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.

**b. Bidang Kelautan, Pesisir dan Perikanan Tangkap**

Melakukan pembinaan di bidang kelautan, pesisir dan perikanan tangkap.

Rincian Tugas :

- Melaksanakan pembinaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Membina dan mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan, penataan ruang laut di wilayah kewenangan provinsi
- Membina dan mengkoordinasikan pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Melakukan analisis data dan informasi wilayah pesisir, kelautan, sarana dan prasarana perikanan tangkap.
- Membina dan mengembangkan teknologi penangkapan spesifik daerah
- Menganalisis stok dan pemanfaatan sumberdaya di wilayah laut kewenangan provinsi
- Melakukan dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola imigrasi dan penyebaran ikan.

**c. Bidang Perikanan Budidaya**

Melaksanakan pembinaan teknologi Budidaya Perikanan.

Rincian Tugas :

- Melakukan fasilitasi transformasi teknologi budidaya laut, payau, air tawar dan perairan umum
- Melaksanakan pengembangan dan pengendalian budidaya perikanan
- Melakukan pembinaan dan pengaturan sarana dan prasarana budidaya
- Melakukan analisis data statistik dan informasi budidaya perikanan
- Melakukan koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan budidaya
- Merencanakan pembangunan perikanan budidaya
- Melakukan pembinaan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan budidaya

**d. Bidang Bina Mutu, Usaha dan Kelembagaan**

Melakukan pembinaan mutu, usaha dan kelembagaan di bidang Kelautan dan Perikanan.

Rincian Tugas :

- Memfasilitasi pembinaan kelembagaan dan permodalan serta kerjasama usaha swasta di bidang perikanan
- Melakukan pelayanan, perizinan, pemantauan, pengawasan, pembinaan pemasaran dan promosi

- Memfasilitasi pembinaan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan dan kelautan
- Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan
- Menetapkan kebijakan dan melaksanakan pungutan perikanan
- Melaksanakan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan di bidang perikanan
- Melaksanakan kebijakan sistem permodalan, promosi dan investasi di bidang perikanan
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan hasil perikanan
- Melaksanakan kebijakan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP

**e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

Melakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Rincian Tugas :

- Melaksanakan sosialisasi dan monitoring terpadu serta pengawasan dan pengamanan sumberdaya ikan dan lingkungan
- Melakukan pembinaan dan pengembangan SDM pengawas kelautan dan perikanan
- Melaksanakan pembinaan, penataan dan penegakan hukum kelautan dan perikanan
- Meningkatkan kapasitas PPNS dan sarana pengawasan
- Pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengawasan (SISWASMAS)

**f. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD)**

**1. UPTD Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (PPMHP)**

Tugas pokok : Melakukan pembinaan, pengujian dan sertifikasi mutu hasil perikanan.

Rincian Tugas:

- Melakukan pemeriksaan, pengambilan contoh dan pengujian mutu hasil perikanan dan kelautan terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan, produk akhir serta peralatan yang digunakan di sentra-sentra produksi dan unit pengolahan.
- Melakukan perawatan, perbaikan dan kalibrasi peralatan/ instrumen pengujian dan pengolahan.
- Menerbitkan sertifikat mutu hasil perikanan. Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan sistem manajemen.

- Melakukan pembinaan laboratorium milik unit pengolahan hasil perikanan.

**2. UPTD Pembinaan Dan Pengembangan Mekanisasi Perikanan Tangkap**

Tugas Pokok : Melakukan pembinaan teknologi penangkapan.

Rincian Tugas :

- Melakukan kajian dan rekayasa teknologi penangkapan ikan
- Melakukan pembinaan dan pemantauan peralatan mesin perikanan.
- Melakukan pembinaan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jarak jauh untuk penangkapan ikan, standarisasi kelayakan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan.

**3. UPTD Pembinaan Dan Pengembangan Sertifikasi Kesehatan Ikan**

Tugas Pokok : Melakukan koordinasi pembinaan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan dan pengembangan kesehatan ikan dan sertifikasi sarana perikanan.

Rincian Tugas :

- Melakukan pembinaan dan pengujian kesehatan ikan.
- Melakukan pembinaan dan standarisasi higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.
- Melakukan kajian pola penyebaran wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.

**4. UPTD Pembinaan Dan Pengembangan Budidaya Laut Dan Pantai**

Tugas Pokok : Melakukan pembinaan dan pengembangan dibidang budidaya laut dan pantai

Rincian Tugas :

- Melakukan pembinaan dan pengembangan teknologi perbenihan budidaya laut dan pantai
- Memfasilitasi transformasi teknologi perbenihan perikanan di laut dan pantai
- Melakukan pembinaan pembangunan dan pengelolaan balai benih air laut dan pantai
- Melakukan pembinaan teknis penggunaan varietas induk/ benih ikan
- Menetapkan standar penggunaan teknologi pembudidayaan laut dan pantai

**5. UPTD Pembinaan Dan Pengembangan Budidaya Air Tawar**

Tugas Pokok : Melakukan pembinaan dan pengembangan di bidang budidaya air tawar

Rincian Tugas :

- Melakukan pembinaan dan pengembangan teknologi perbenihan budidaya air tawar
- Memfasilitasi transformasi teknologi perbenihan perikanan di air tawar
- Melakukan pembinaan pembangunan dan pengolahan balai benih air tawar
- Melakukan pembinaan teknis penggunaan varietas induk/ benih ikan
- Menetapkan standar penggunaan teknologi pembudidayaan air tawar

## **2. Fungsi**

### **Kepala Dinas**

- Pembina umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah
- Pembina teknis di bidang kelautan dan perikanan
- Koordinasi penataan ruang dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di bidang kelautan dan perikanan
- Pemberian izin usaha, pembinaan mutu dan pemasaran sesuai tugas pokoknya
- Koordinasi penyelenggaraan pendidikan aparatur dan penyuluhan.
- Kajian pengembangan teknologi dan informasi serta promosi dan pengembangan investasi.
- Penyelenggara dan kordinasi usaha konservasi, rehabilitasi, pengawasan dan pengendalian serta penegakan aturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- Penyelenggara urusan tata usaha dinas
- Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas

### **Sekretaris**

- Penyiapan penyusunanbahan rencana anggaran belanja dan pendapatan dinas yang meliputi pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan.
- Pelaksanaan urusan kepegawaian dinas, penyiapan penyusunan bahan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi, kenaikan pangkat dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- Perumusan rencana, evaluasi, pemantauan dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana.
- Pengelolaan administrasi surat menyurat, sistem kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

**Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian**

- Menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas
- Merumuskan rencana kebutuhan perlengkapan dinas
- Melaksanakan dan mengatur administrasi, barang inventaris, pendistribusian, pemanfaatan dan pengusulan penghapusan barang
- Menyelenggarakan urusan kehumasan dan perpustakaan dinas
- Menyusun laporan barang investasi dinas
- Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian
- Menyusun rencana formasi jabatan dan data pegawai
- Melaksanakan usul mutasi, kenaikan pangkat, pensiun, pemberhentian, izin belajar, karpeg, kartu askes dan pembinaan karir pegawai.
- Melaksanakan urusan kenaikan gaji berkala dan cuti.
- Melaksanakan kordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui program pendidikan.
- Mengurus dan membina peningkatan kesejahteraan, disiplin, absensi dan mengusulkan pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi serta mengusulkan pemberian sanksi kepada pegawai yang indisipliner.
- Mengembangkan penerapan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG)
- Mengevaluasi pelaksanaan kewajiban pelaporan LP2P

**Sub. Bagian Program**

- Melaksanakan evaluasi dan penyiapan bahan perumusan rencana program dan kegiatan.
- Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa bahan-naham dalam rangka penyusunan rencana kegiatan dinas.
- Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan dinas dengan unit-unit kerja terkait.
- Menyusun laporan tahunan dan data statistik kelautan dan perikanan
- Mengkoordinasikan rencana induk pengembangan perikanan
- Membuat konsep naskah dinas, keputusan dan ketatalaksanaan dinas
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

**Sub. Bagian Keuangan**

- Menginventaris sumber-sumber penerimaan dinas
- Menggali sumber-sumber penerimaan baru yang potensial
- Melaksanakan pencatatan terhadap pemungutan dan pelaporan Pendapat Asli Daerah (PAD)
- Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan pembinaan administrasi bendaharawan lingkup dinas
- Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas bendaharawan lingkup dinas
- Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dinas
- Mengklarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

#### **Bidang Kelautan, Pesisir dan Perikanan Tangkap**

- Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian ikan di laut dan perairan umum termasuk pengembangan teknologi penangkapan spesifik daerah serta pengujian dan penerapan teknologi di bidang penangkapan ikan dan kapal perikanan.
- Pelaksanaan identifikasi dan koordinasi kawasan konservasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Pelaksanaan pembinaan sarana dan prasarana penangkapan ikan.
- Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pengembangan sumberdaya non hayati, analisis perhitungan dan pemetaan jasa kelautan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya

#### **Bidang Perikanan Budidaya**

- Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, standarisasi dan memfasilitasi transformasi teknologi budidaya laut, payau, air tawar dan perairan umum
- Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian budidaya ikan air tawar, laut, payau dan perairan umum
- Pelaksanaan pembinaan dan pengaturan sarana dan prasarana budidaya
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya

**Bidang Bina Mutu, Usaha dan Kelembagaan**

- Fasilitasi pembinaan mutu, pemasaran hasil perikanan, kelembagaan, permodalan, bimbingan pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan
- Pelayanan perizinan, pemantauan dan pengawasan, pembinaan pemasaran dan promosi
- Fasilitasi pembinaan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan dan kelautan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya

**Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

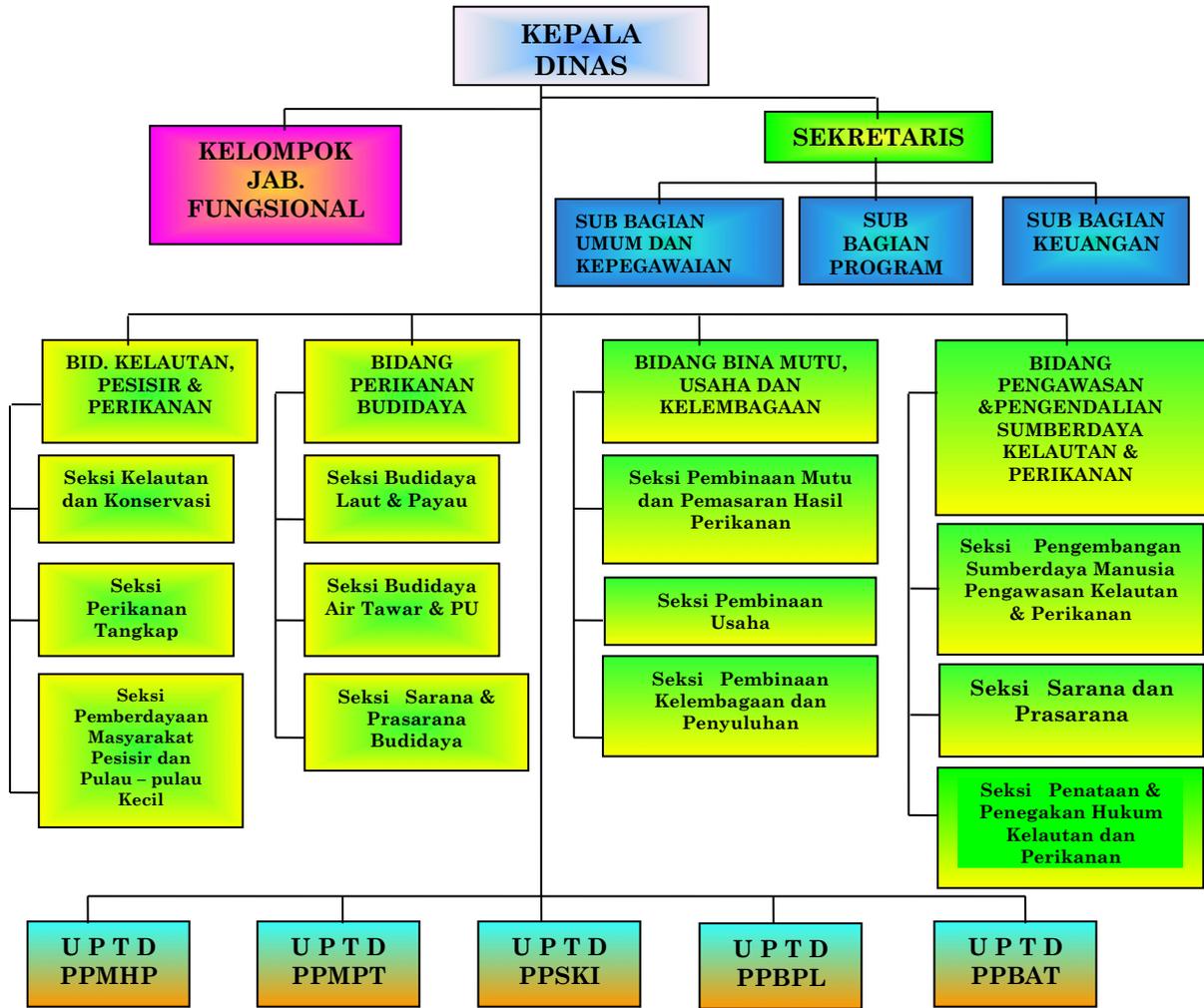
- Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan analisis sumberdaya ikan dan kelautan
- Pembinaan dan pengembangan SDM pengawasan kelautan dan perikanan
- Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kesehatan ikan
- Penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan dan kelautan
- Pembinaan penataan dan penegakan hukum kelautan dan perikanan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya

**4. Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah No.08 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 28 Juli 2008 sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi 3 Sub Bagian
3. Kepala Bidang (empat) dengan membawahi masing – masing 3 seksi
4. Kepala UPTD

Adapun struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :



**Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan**

## 2.2. Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan

### 2.2.1.Kepegawaian

#### a. Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 tercatat sebanyak 207 orang, dengan tingkat pendidikan bervariasi dari Sekolah Dasar (SD) sampai Magister Sains (S2). Adapun Strukturnya sebagai berikut :

**Tabel.2.1.**  
**Struktur Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	S3	1	1	2
2	S2	22	10	32
3	S1	59	62	121
4	Sarjana Muda	8	4	12
5	SLTA	24	10	34
6	SLTP	1	0	1
7	SD	4	1	5
	<b>Jumlah</b>	<b>119</b>	<b>88</b>	<b>207</b>

*Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013*

#### b. Tingkat Penjenjangan dan Eselon

Tingkat penjenjangan yang telah diikuti oleh pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2008 – 2012 sebanyak 6 orang yang mulai dari Diklat PIM IV sampai dengan Diklat PIM II. Adapun strukturnya sebagai berikut :

**Tabel.2.2.**  
**Struktur Diklat PIM 2008 -2012**

No	Diklat	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Diklat PIM II			
2	Diklat PIM III	1	-	1
3	Diklat PIM IV	4	1	5
	<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>

*Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013*

**Tabel.2.3.**  
**Jumlah Jabatan Struktural**

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	9	1	10
3	Eselon IV	19	6	25
	Jumlah	29	7	36

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013

**g. Pangkat dan Golongan**

Tingkat kepangkatan dan golongan pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan bervariasi dari Golongan I sampai Golongan IV, adapun strukturnya sebagai berikut :

**Tabel.2.4.**  
**Struktur Pegawai Menurut Tingkat Kepangkatan dan Golongan**

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Golongan IV/d	1	-	1
2	Golongan IV/c	-	-	-
3	Golongan IV/b	7	1	8
4	Golongan IV/a	8	5	13
5	Golongan III/d	21	12	33
6	Golongan III/c	11	9	20
7	Golongan III/b	33	31	64
8	Golongan III/a	15	19	34
9	Golongan II/d	4	1	5
10	Golongan II/c	5	1	6
11	Golongan II/b	9	6	15
12	Golongan II/a	4	2	6
13	Golongan I/d	-	-	-
14	Golongan I/c	1	-	1
15	Golongan I/b	-	1	1
16	Golongan I/a	-	-	-
	Jumlah	118	89	207

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013

#### **h. Distribusi Sumberdaya Pegawai**

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi terdiri atas 4 bidang teknis, Sekretariat dan didukung 5 Unit Pelayanan Teknis Daerah. Pada unit tersebut telah terdistribusi pegawai dengan jumlah sumberdaya kepegawaian sebagai berikut :

**Tabel. 2.5**  
**Distribusi Sumberdaya Pegawai**

No	Bidang/Unit	PNS		Jumlah	Tenaga Kontrak		Jumlah
		Jenis Kelamin			Jenis Kelamin		
		Pria	Wanita		Pria	Wanita	
1	Perikanan Budidaya	9	9	18	9	5	14
2	Kelautan, Pesisir dan Perikanan Tangkap	18	15	33	2	5	7
3	Bina Usaha dan Kelembagaan	12	14	26	1	2	3
4	Pengawasan dan Sumberdaya KP	14	6	20	3	2	5
5	Sekretariat						
	a. Subag Umum dan Kepegawaian	20	10	30	-	-	-
	b. Subag Keuangan	10	4	14	-	-	-
	c. Subag Program	5	10	15	-	-	-
6	UPTD PPMHP	5	13	18	9	6	15
7	UPTD PPBAT	7	2	9	-	-	-
8	UPTD PPBLP	6	1	7	-	-	-
9	UPTD PPSKI	6	4	10	-	-	-
10	UPTD PPMPPT	5	2	7	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>117</b>	<b>90</b>	<b>207</b>	-	-	-

*Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013*

#### **2.2.2. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan Prasarana yang mendukung Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengembangkan Program dan kegiatan guna menunjang tugas dan fungsi pelayanan adalah :

##### **A. Bidang Perikanan Tangkap**

Pelabuhan Perikanan adalah Prasarana Perikanan tangkap yang fungsinya :

1. Tempat kegiatan bongkar muat hasil perikanan

2. Sebagai sarana bengkel untuk perbaikan kapal, mesin dan alat tangkap ikan
3. Sebagai tempat sarana pembinaan nelayan dan sekaligus sebagai home base nelayan

Disamping sarana dan prasarana tersebut, juga dilengkapi sarana penunjang yakni (1) Tempat Pemasaran Ikan, (2) Tempat Kapal Bersandar, (3) Perkantoran

Di Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2012, terdapat **20 unit Pelabuhan Perikanan (Tipe D) yang ada di 15 Kabupaten/kota dengan kondisi rata – rata baik, dan 11 unit yang dalam tahap pembangunan.** Secara detail keberadaan Pelabuhan Perikanan di Sulawesi Selatan seperti pada tabel 2.6.

**Tabel 2.6.**  
**Kondisi Sarana Pelabuhan Perikanan di Sulawesi Selatan**

NO	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	LOKASI		KLAS / TYPE	KETERANGAN
		KAB./KOTA			
1	Pelabuhan Perikanan Untia	Kota Makassar		PPN / B	Tahap pembangunan
2	Pelabuhan Perikanan Paotere	Kota Makassar		PPI / D	Operasional
3	Pelabuhan Perikanan Rajawali	Kota Makassar		PPI / D	Operasional
4	Pelabuhan Perikanan Bontobahari	Kab. Maros		PPI / D	Tahap pembangunan
5	Pelabuhan Perikanan Labuang	Kab. Maros		PPI / D	Operasional
6	Pelabuhan Perikanan Maccini Baji	Kab. Pangkep		PPI / D	Operasional
7	Pelabuhan Perikanan Polejiwa	Kab. Barru		PPI / D	Tidak Oprasional
8	Pelabuhan Perikanan Cempae	Kota Parepare		PPI / D	Operasional
9	Pelabuhan Perikanan Lonrae	Kab. Bone		PPI / D	Operasional
10	Pelabuhan Perikanan Siwa	Kab. Wajo		PPI / D	Tidak Oprasional
11	Pelabuhan Perikanan Bonepute	Kab. Luwu		PPI / D	Tahap pembangunan
12	Pelabuhan Perikanan Ulo-Ulo	Kab. Luwu		PPI / D	Tidak Oprasional
13	Pelabuhan Perikanan Balambang	Kab. Luwu		PPI / D	Tahap pembangunan
14	Pelabuhan Perikanan Pontap	Kota Palopo		PPI / D	Operasional
15	Pelabuhan Perikanan Malangke	Kab. Luwu Utara		PPI / D	Tahap pembangunan
16	Pelabuhan Perikanan Malili	Kab. Luwu Timur		PPI / D	Operasional
17	Pelabuhan Perikanan Lappa	Kab. Sinjai		PPI / D	Operasional
18	Pelabuhan Perikanan Kajang	Kab. Bulukumba		PPI / D	Operasional
19	Pelabuhan Perikanan Bontobahari	Kab. Bulukumba		PPI / D	Tahap pembangunan
20	Pelabuhan Perikanan Birea	Kab. Bantaeng		PPI / D	Operasional
21	Pelabuhan Perikanan Tanrusampe	Kab. Jeneponto		PPI / D	Tidak Operasional
22	Pelabuhan Perikanan Boddia	Kab. Takalar		PPI / D	Tidak Operasional
23	Pelabuhan Perikanan Beba	Kab. Takalar		PPI / D	Tahap pembangunan
24	Pelabuhan Perikanan Barombong	Kab. Gowa		PPI / D	Operasional
25	Pelabuhan Perikanan Bonehalang	Kab. Kep. Selayar		PPI / D	Operasional

Sumber : Subdin Perikanan Tangkap dan Laporan Tahunan 2013

### **A.1. UPTD Pengembangan dan Pembinaan Mekanisasi Penangkapan Ikan (PPMPT)**

Unit Pelayanan Teknis Perikanan Tangkap yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah UPTD. Pengembangan dan Pembinaan Mekanisasi Penangkapan Ikan (UPTD. PPMPT), yang peranannya adalah :

1. Tempat melatih dan membina petugas pemerintah dan swasta di Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan
2. Tempat pembelajaran bagi petugas pemerintah dan swasta yang menyangkut kegiatan perikanan tangkap, seperti pembuatan alat tangkap, perakitan mesin kapal tangkap dan mendesain kapal tangkap.

## **B. Bidang Perikanan Budidaya**

### **B.1. Dempon Tambak**

Sarana Dempon tambak milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terdapat di hampir seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Adapun peranan sarana tersebut adalah :

1. Tempat uji coba teknologi budidaya
2. Tempat pelatihan dan pembinaan bagi petugas pemerintah dan swasta untuk berusaha di bidang perikanan tambak
3. Sarana pembelajaran bagi petugas perikanan budidaya dalam peningkatan kinerjanya

### **B.2. UPTD Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Pantai dan Laut (UPTD PPBPL)**

Sarana UPTD Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Pantai dan Laut (UPTD.PPBPL) yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terdapat di kabupaten Barru, yang peranannya adalah :

1. Sarana uji coba pembenihan udang untuk spesies atau jenis udang tertentu
2. Sarana pengkajian terhadap tingkat produktivitas dan kelangsungan hidup
3. Sarana pelatihan, pembinaan petugas pemerintah dan swasta yang berusaha dibidang pembenihan udang
4. Sarana pembelajaran bagi petugas BPU dalam peningkatan kinerjanya
5. Sebagai unit produksi benur udang

### **B.3. UPTD Pembinaan dan Pengembangan Budiaya Air Tawar (UPTD. PPBAT)**

Sarana UPTD Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Air Tawar (UPTD.PPBAT) yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terdapat di Kabupaten Soppeng dan pengembangannya didukung Lima (5) Kabupaten/Kota, masing – masing yaitu Kabupaten Tana

Toraja, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kota Palopo dan Kabupaten Gowa. Adapun peranannya adalah :

1. Sarana uji coba teknologi pembenihan dan pembesaran ikan air tawar
2. Sarana Pelatihan dan Pembinaan kegiatan budidaya air tawar
3. Sarana pemurnihan benih ikan air tawar untuk menghasilkan bibit ikan dan calon induk unggul dan tahan terhadap penyakit
4. Sarana produksi untuk kebutuhan Restocking dan pemenuhan calon induk untuk Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan BBI lokal Kabupaten/Kota.

## **C. Pembinaan Usaha dan Kelembagaan**

### **C.1. UPTD Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (UPTD. PPMHP)**

UPTD Pembinaan dan Pengujian Mutu dan Hasil Perikanan (UPTD PPMHP) yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 1 unit, yang berlokasi dikota Makassar adapun peranannya adalah :

1. Sarana pengujian terhadap mutu hasil perikanan,
2. Sarana pengkajian terhadap mutu hasil pengolahan modern dan tradisional hasil perikanan,
3. Sarana pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan,
4. Sarana pelatihan dan pembelajaran bagi petugas pemerintah dan swasta yang menangani hasil perikanan.

### **C.2. Depo**

Disamping sarana Unit Pelayanan Teknis Daerah Pembinaan Mutu dan Hasil Perikanan (UPTD PPMHP) tersebut diatas, juga dilengkapi dengan Depo yang peranannya adalah sarana penyimpanan produksi hasil perikanan terutama pada saat ikan/udang mengalami panen puncak.

## **D. Perlindungan, Pengawasan dan Pengendalian**

Unit perlindungan, pengawasan dan pengendalian melaksanakan tugas pada usaha penangkapan dan budidaya. Khusus untuk pelaksanaan tugas pada kegiatan penangkapan, unit ini dilengkapi dengan kapal pengawasan perikanan. Dalam kegiatan tugas pengawasan dilaut, petugas perikanan sering bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut dan Kepolisian Perairan Laut, terutama pada saat operasi lapangan dilakukan. Secara keseluruhan sarana dan prasarana pendukung Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan seperti pada tabel berikut :

**Tabel 2.7.**  
**Sarana dan Prasarana Pendukung**  
**Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Sarana/Prasarana	Jumlah (Unit)
1	Pos Pengawas	6
2	Kapal Pengawasan	2

Sumber : Subdin Perlindungan, Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya KP dan Laporan Tahunan 2013

### **2.3. Kinerja Pelayanan**

#### **2.3.1. Produk Regional Domestik Bruto (PDRB)**

PDRB Sub Sektor Perikanan memegang peranan strategis dalam memberikan kontribusi bukan hanya PDRB kelompok Pertanian secara umum tetapi juga pada PDRB Sulawesi Selatan. PDRB Sub Sektor Perikanan dari tahun 2008 sampai tahun 2012 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kelompok sub sektor lain pada kelompok pertanian. PDRB Sub Sektor Perikanan mengalami kenaikan yang paling tinggi yakni mencapai 8,37 % (BPS, 2012). Mempertimbangkan adanya pengaruh yang sangat besar dari kinerja sub sektor/sector lain, maka indikator kinerja utama kontribusi PDRB perikanan sejak tahun 2012 diubah menjadi pertumbuhan PDRB perikanan. Pada tahun 2008 pertumbuhan PDRB perikanan mencapai 7,3 %. Selanjutnya kinerja pembangunan kelautan dan perikanan pada tahun 2012 diperkirakan mampu memberikan pertumbuhan PDRB perikanan sebesar 8,7 %.

#### **2.3.2 Produksi Perikanan**

Sejalan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang termuat dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2008 maka pelaksanaan Visi Misi dalam mencapai sasaran kinerja adalah pertumbuhan produksi perikanan. Selama kurun waktu 2008 – 2012, produksi perikanan Sulawesi Selatan meningkat sebesar 22,9 % per tahun, yakni dari 1.093.367,3 ton pada tahun 2008 menjadi 2.495.576,2 ton pada tahun 2012. Capaian produksi perikanan tersebut didukung oleh kontribusi produksi perikanan budidaya yang terus mengalami kenaikan, yakni mencapai 16,9 % per tahun selama periode tahun 2008 – 2012.

#### **2.3.3. Produksi Komoditi Unggulan**

Pengembangan komoditi perikanan unggulan, yaitu Udang dan Rumput Laut sangat penting ditingkatkan produksi dan kualitasnya mengingat komoditas ini memberi dampak yang

cukup besar terhadap produksi perikanan dan pendapatan masyarakat pesisir seperti dijelaskan sebagai berikut :

## **1. Udang**

Komoditas udang mencakup Udang Windu, Vannamei, Udang Putih dan lainnya. Sekaitan dengan upaya peningkatan produksi, maka selama periode 2008 – 2012 telah terjadi peningkatan rata – rata 13,3 % pertahun, yaitu dari 17.733 Ton pada tahun 2008 menjadi 17.829,3 ton pada tahun 2009, menjadi 22.840,4 ton pada tahun 2010, menjadi 26.824,6 ton pada tahun 2011 hinggatahun 2012 mencapai 28.145,6 ton.

Potensi tambak di Sulawesi Selatan dalam rangka pengembangan perikanan budidaya udang sebesar 120.738 Ha. Pada RPJMD target produksi udang pada tahun 2013 sebesar 33.200 ribu ton dengan Pemanfaatan tambak rakyat seluas 95.000 Ha, sampai dengan tahun 2012 pemanfaatan tambak dalam rangka pengembangan produksi udang sudah mencapai 106.842 Ha. Hal ini disebabkan antusiasnya masyarakat dalam prospek pengembangan produksi udang, tuntutan pasar dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada **kegiatan Gerakan Kebangkitan Udang**.

## **2. Rumput Laut**

Rumput laut yang dikembangkan di Sulawesi Selatan oleh pembudidaya terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu *Eucheuma spp* dan *Gracillaria spp*. Kedua komoditas rumput laut ini dibudidayakan di laut dan tambak. Dalam rangka peningkatan produksi rumput laut oleh pemerintah Sulawesi Selatan selama periode 2008 – 2012 telah terjadi peningkatan rata – rata 29,5 % pertahun, yaitu dari 748.527,8 Ton pada tahun 2008 menjadi 824.026 ton pada tahun 2009, menjadi 1.517.690 ton pada tahun 2010, menjadi 1.675.806,9 ton pada tahun 2011 hingga sampai pada tahun 2012 telah mencapai 2.104.446 ton.

Sejalan dengan kecenderungan peningkatan pasar rumput laut yang terus meningkat, maka Sulawesi Selatan berpeluang untuk menjadi produsen utama rumput laut di Indonesia bahkan di dunia mengingat sumberdaya alam yang dimiliki begitu besar, dengan potensi sebesar 193.700 Ha dan baru dimanfaatkan untuk usaha budidaya rumput laut di laut di saat ini sebesar 35.095 Ha. Untuk pengembangan budidaya rumput laut di tambak, maka dengan potensi pengembangan sebesar 120.738 Ha maka sampai tahun 2011 telah termanfaatkan lahan tambak untuk usaha budidaya rumput laut sebesar **20.356,1 Ha**.

### **2.3.4. Eksport Hasil Perikanan**

Realisasi Nilai Ekspor Hasil Perikanan sampai tahun 2012 mencapai 200,2 US\$ juta dengan volume 84.128,5 ton. Capaian nilai ekspor ini meningkat 7,2 % apabila dibandingkan

dengan nilai ekspor hasil perikanan tahun 2011 yakni 186,8 US\$ juta. Kontribusi nilai ekspor tertinggi pada tahun 2012 adalah dari komoditas Rumput Laut yakni mencapai 30,8 % dari nilai ekspor hasil perikanan.

Peningkatan ekspor hasil perikanan ini, disebabkan oleh arah kebijakan ekspor yang semakin baik. Meskipun ditengah terjadi kondisi perekonomian yang memburuk di Eropa, yang ditandai dengan mulai diarahkannya tujuan ekspor dari pasar-pasar tradisional (Jepan, USA dan UE) ke pasar-pasar prospektif (Korea Selatan, Cina, Malaysia dan Timur Tengah). Disamping itu, peningkatan ekspor tersebut merupakan dampak dari Kebijakan pemerintah Pusat yaitu penurunan kasus *Rapid Alert System (RAS)* yang menimpa produk perikanan Indonesia di pasar Luar Negeri. Sehingga berdasarkan kebijakan tersebut, Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia telah mendapatkan hak kembali untuk mengajukan *Approval Number ( Re-authorized for Approval Number)* baru bagi Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang akan mengekspor ke UE.

Kenaikan nilai ekspor yang lebih tinggi dibandingkan dengan volumenya menunjukkan adanya peningkatan harga rata-rata produk perikanan yang diekspor, yang diantara lain disebabkan sebagian besar ekspor telah mengarah pada produk bernilai tambah (***non primary product***). Disamping itu, neraca perdagangan hasil perikanan Provinsi Sulawesi Selatan memperlihatkan pertumbuhan surplus yang cukup tinggi dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 33,8 % per tahun. Pada tahun 2013, diperkirakan nilai eksport hasil perikanan akan mencapai 204,2 juta US\$.

#### **2.3.5. Konsumsi Ikan Perkapita (KIP)**

Pada tahun 2012, capaian rata-rata Konsumsi Ikan Perkapita Sulawesi Selatan adalah 41,8 Kg/Per kapita atau meningkat sebesar 4,3 % apabila dibandingkan dengan rata-rata konsumsi ikan perkapita Sulawesi Selatan padatahun 2008 yang besarnya 35,3 Kg/kapita.

#### **2.3.6 Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya Ikan**

Berdasarkan hasil perhitungan BPS, NTN tahun 2012 bulan Desember dengan nilai 111,56 artinya nelayan/pembudidaya masih dapat menyimpan hasil pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penangkapan/budidaya ikan setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Pada bulan Januari tahun 2012 merupakan titik tertinggi dengan nilai 112,93.

Secara kumulatif rata-rata Nilai Tukar Nelayan pada tahun 2010 berada pada nilai 112,14 dan meningkat pada tahun 2011 sebesar 112,94 dan bergerak turun tahun 2012 sebesar 112,22.

### **2.3.7 Luas Kawasan Konservasi Perairan**

Apabila dibandingkan dengan capaian Kinerja pada tahun 2008 dengan luas target kawasan konservasi perairan 600.000 Ha. Dapat direalisasikan seluas 590.073 Ha. Atau mencapai 98,35 %. Luas kawasan konservasi perairan laut di Sulawesi Selatan tahun 2012 mencapai 762.055,12 Ha.

Luas dan tipe kawasan konservasi perairan diatas merupakan kumulatif hasil kerja sama pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kawasan konservasi perairan . Target utama adalah kawasan konservasi perairan secara efektif berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Pada Tahun 2008 – 2012 telah dilakukan upaya-upaya pengelolaan dalam kawasan konservasi tersebut. Terdapat 7 kawasan dengan luasan mencapai 177.375,10 Ha atau tercapai 88,69 %, jika dibandingkan dengan rencana target sampai dengan 2012 secara agregasi seluas 177.398,59 Ha, maka sudah tercapai 88,70 %.

### **2.3.8 Jumlah Pulau-Pulau Kecil yang Dikelola**

Pada Tahun 2012 tingkat capaian kinerja telah dilaksanakan pengelolaan dan pembinaan pada 118 Pulau atau mencapai 98,33 %. Jika dibandingkan dengan rencana target sampai akhir Renstra tahun 2013 secara agregasi sebanyak 120 Pulau-Pulau, maka sampai pertengahan tahun 2013 secara akumulasi sudah dicapai sejumlah 120 .Pulau Kecil atau 100 .%, sesuai dengan rencana target sampai tahun 2013.

Kegiatan yang dilakukan meliputi identifikasi potensi dan pemetaan pulau-pulau kecil, rehabilitasi ekosistem dan fasilitasi, investasi Pulau-Pulau kecil dan Penyediaan Infrastruktur. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan data untuk menggali dan mengetahui potensi dari pulau-pulau kecil yang meliputi aspek biofisik perairan, flora dan fauna serta kondisi social ekonomi masyarakat yang ada pada pulau tersebut.

### **2.3.9 Persentase Wilayah Perairan yang Bebas Illegal Fishing dan Kegiatan yang Merusak Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

Realisasi sasaran perairan Sulawesi Selatan bebas illegal fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan pada tahun 2012 dari target sebesar 20 kasus diselesaikan sebesar 41 kasus telah tercapai sebesar 74,4% dari target. Dibandingkan tahun 2008 dengan target presentase sebesar 10 kasus diselesaikan sebesar 18 kasus atau tingkat capaian 18 %.

Dalam rangka penanggulangan Illegal Fishing dilaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, khususnya operasi kapal pengawas baik secara mandiri maupun melalui operasi bersama dengan instansi penegak hukum. Dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan dari kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan dibentuk

dan dibina Kelompok Masyarakat Pengawas yang diberdayakan secara mandiri. Pencapaian jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas yang aktif Tahun 2012 telah tercapai sebesar 119 Kelompok dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 70 Kelompok dengan presentase capaian 85,9%.

### **2.3.10 Pengembangan SDM Aparat dan Masyarakat Usaha Perikanan dalam mendukung Peningkatan Produksi Perikanan**

Dalam rangka peningkatan produksi perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan beberapa upaya untuk mencapai target sasaran yang diinginkan. Beberapa upaya strategis dilakukan untuk mewujudkannya, salah satunya adalah pengembangan SDM Aparat dan Masyarakat. Berdasarkan data dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan penilaian yang sama dan diberikan pada masyarakat atas kesamaan dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan serta atas berbagai peran yang mereka lakukan untuk mewujudkan Pengarusutamaan Gender, maka persentase keterwakilan perempuan terhadap laki-laki untuk memperoleh kesempatan untuk pengembangan SDM dapat dilihat pada tampilan data pada tabel.

**Tabel 2.8**  
**Pengembangan SDM Aparat dan Masyarakat Usaha Perikanan (Berbasis Gender)**  
**Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Perikanan**  
**Tahun 2011 – 2012**

Uraian	Realisasi (%) per Tahun			
	2011		2012	
	L	P	L	P
Aparat Dinas KP	60,88	39,10	59,97	39,11
Pembudidaya	96,17	3,82	97,56	3,82
Nelayan	97,80	2,80	94,29	2,80
Pengolah dan Pemasar	49,11	50,88	27,86	50,88
Jumlah	303,96	37,71	279,68	96,60
Rasio	1,31		1,42	

Sumber : Data Olahan DKP Prov. Sulsel Tahun 2013

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan persentase keterwakilan perempuan dalam pengembangan SDM mempunyai nilai ketimpangan gender terutama pada pengembangan SDM untuk nelayan dan pembudidaya, hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya budaya patriarki yang lebih mendominankan peran laki-laki sebagai pencari nafkah sehingga peran di luar rumah diprioritaskan untuk laki-laki sehingga akses perempuan menjadi rendah untuk ikut berpartisipasi, selain itu kurangnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan

sehingga jadwal kegiatan seringkali tidak sesuai dengan waktu luang dari perempuan untuk mengikuti kegiatan di luar rumah. Keengganan wanita nelayan untuk masuk dalam kegiatan produktif juga disebabkan antara lain oleh budaya masyarakatnya yang masih melarang wanita untuk bekerja. Bagi mereka perempuan hanya bertugas di dapur dan mengurus anak-anak. Namun seiring dengan tekanan ekonomi yang semakin berat wanita semakin terdorong untuk meringankan beban keluarganya, sehingga mereka ikut serta dalam kegiatan produktif. Pekerjaan yang dilakukan istri nelayan di pasar sebagai pekerjaan sampingan sekaligus untuk menambah penghasilan guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Keikutsertaan perempuan nelayan dalam kegiatan produktif di bidang perikanan bisa dibilang masih minim padahal perempuan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pembangunan pesisir

Beberapa langkah yang akan ditempuh untuk meminimalisasi ketimpangan tersebut diantaranya (i) penyiapan data yang mendukung analisis gender berupa pemisahan data perempuan dan laki-laki; (ii) mendorong keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, diantaranya dengan membuat jadwal kegiatan yang membuat perempuan dapat terlibat; dan (iii) meningkatkan kapasitas masyarakat dan aparat untuk mengarusutamakan gender. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) adalah kunci untuk keberhasilan pembangunan nasional jangka panjang.

Capaian kinerja pelayanan tersebut diatas merupakan data perkembangan capaian kinerja selama 5 (lima) tahun berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi. Berdasarkan hasil capaian maka Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan meraih penghargaan sebagai Propinsi yang memiliki Kinerja terbaik bidang Perikanan Budidaya dalam pencapaian produksi, Propinsi Sulawesi Selatan berada pada peringkat 1 (satu) tingkat Nasional (Sumber : Data Statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan RI).

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan**

Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan memiliki tantangan dan peluang. Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan Renstra Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi terhadap perencanaan lima tahun ke depan. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

#### **2.4.1 Tantangan**

- a. Ketergantungan masyarakat Sulsel yang cukup tinggi terhadap SDA dan lingkungan pesisir dan laut serta belum termanfaatkannya secara optimal sumberdaya jasa kelautan.
- b. Degradasi lingkungan sensitive (mangrove, terumbu karang, dan padang lamun) dan penurunan mutu perairan.
- c. Masih maraknya penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (destructive fishing) dan potensi konflik nelayan yang sangat tinggi.
- d. Sebahagian besar asset nelayan dan petambak tidak bersertifikat, sehingga sulit mengakses perbankan atau lembaga keuangan
- e. Pengembangan teknologi produksi relative lambat dan stagnan.
- f. Infrastruktur sektor perikanan dan kelautan (irigasi tambak, pelabuhan perikanan, sarana pengolahan dan armada penangkapan) masih terbatas.
- g. Serangan hama dan penyakit belum dapat dikendalikan secara maksimal serta masih maraknya penggunaan antibiotik dan bahan terlarang lainnya.
- h. Rendahnya aksesibilitas dan, kualitas layanan antar pulau dan pembinaan pada pulau-pulau kecil.
- i. Kesenjangan gender terhadap pembinaan dan pengembangan SDM kelompok baik di daerah pesisir maupun pada daerah pulau-pulau kecil
- j. Masih banyaknya fasilitas pemerintah yang tidak berfungsi secara optimal, misalnya TPI, PPI dll.
- k. Belum tersertifikasinya sebahagian besar sarana produksi yang ada di masyarakat seperti tambak, hatchery, cold storage, kapal nelayan dan sarana produksi lainnya
- l. Kemiskinan berkepanjangan secara struktural, kultural terutama di desa nelayan
- m. Kerusakan lingkungan yang cukup parah (kerusakan fisik habitat ekosistem pesisir, pencemaran-sedimentasi dan abrasi pantai), perubahan iklim serta ancaman bencana alam (banjir, longsor, abrasi dan intrusi air laut).
- n. Kesadaran masyarakat atas kelestarian lingkungan yang sangat rendah dan lemahnya penegakan hukum (*Law Enforcement*) serta rendahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.
- o. Pengetahuan dan keterampilan teknis aparat masih rendah.
- p. Lemahnya dukungan perbankan dan lembaga keuangan.
- q. Mutu produk yang masih rendah, Sistem pengendalian dan pengawasan mutu belum berjalan dengan baik.
- r. Issu perdagangan internasional seperti : Issu kualitas (ISO 9000), Issu lingkungan (ISO 14000), Issu Ham, Issu tenaga kerja, Issu responsible fisheries, Issu Keamanan pangan

(Food Safety Attributes) serta Potensi embargo Negara Uni Eropa, Amerika dan Jepang terhadap produk perikanan yang cukup besar.

- s. Potensi konflik pemanfaatan ruang sangat besar (konflik Institusional, konflik sosial, konflik teknologi dll)

#### **2.4.2 Peluang**

- a. Dukungan pemerintah melalui regulasi dan swasta terhadap pengembangan usaha perikanan dan kelautan semakin baik.
- b. Peluang usaha dibidang perikanan semakin terbuka.
- c. Pejerapan CBIB dan CPIB serta sertifikasi tambak
- d. Dukungan permodalan oleh pemerintah, swasta dan perbankan dengan bentuk kredit murah dan pola kemitraan.
- e. Kelembagaan nelayan, pembudidaya semakin berkualitas dan berkembang.
- f. Kualitas sumberdaya manusia perikanan dan kelautan yang berbasis Gender semakin meningkat dan bertambah.
- g. Pemanfaatan dan pengawasan sumberdaya alam yang optimal dan bertanggung jawab.
- h. Pencegahan degradasi atau kerusakan lingkungan semakin intensif.
- i. Peningkatan mutu dan keamanan produk hasil perikanan.
- j. Peningkatan kapasitas melalui inovasi teknologi, modal, pasar, penentuan kawasan dan sinkronisasi kebijakan.

### **BAB III**

## **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang telah dilaksanakan menggambarkan layanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang senantiasa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternal merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak dapat diabaikan. Isu yang diuraikan yaitu keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan memberikan dampak yang signifikan di masa datang dan akan berpengaruh terhadap layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan di masa lima tahun mendatang. Informasi berdasarkan perumusan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

**Tabel.3.1**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan**

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan
			Internal (Kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan)	Eksternal (Diluar Kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>KEDAULATAN PANGAN</b>	Tahun 2013 Produksi Perikanan : 2.884.007 Ton  Perikanan tangkap: 277.894 Ton  Perikanan Budidaya 2.591.769,1 Ton  Produksi udang: 34.420,7 Ton  Produksi rumput laut: 2.422.154 Ton	SPM SOP	a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil. b. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. c. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi. d. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. e. Pendaftaran kapal perikanan diatas 5 GT sampai dengan 30 GT f. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi g. Ekstensifikasi dan intensifikasi usaha perikanan untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi. h. Penguatan faktor input dan sarana prasarana pendukung produksi. i. Penguatan keamanan produk pangan perikanan.	a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) c. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. d. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. e. Pengelolaan pembudidayaan ikan f. Meningkatkan peran, akses kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan KP	<ul style="list-style-type: none"> <li>✧ Jumlah tangkap masih kurang akibat terbatasnya armada penangkapan ikan baik di laut dan maupun di perairan umum</li> <li>✧ Sarana dan prasarana usaha perikanan dalam mendukung produksi masih terbatas</li> <li>✧ Inovasi Teknologi usaha perikanan masih minim</li> <li>✧ SDM nelayan dan pembudidaya masih kurang terutama penanganan mutu dan kualitas hasil produksi</li> <li>✧ Keterbatasan modal usaha dan akses perbankan</li> <li>✧ Daya Saing usaha cukup tinggi</li> <li>✧ Belum terintegrasinya sistem produksi hulu dan hilir.</li> <li>✧ Hama dan penyakit udang/ikan</li> <li>✧ Kesenjangan Gender yang disebabkan Budaya patriarki yang lebih mendominasi peran laki-laki sebagai pencari nafkah sehingga peran di luar rumah diprioritaskan untuk laki-laki sehingga akses perempuan menjadi rendah untuk ikut berpartisipasi</li> </ul>

*Rencana Strategis Perubahan 2013-2018*

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan
			Internal (Kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan)	Eksternal (Diluar Kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>KEMARITIMAN</b>	a. Luas Kawasan konservasi laut dan perairan (2 ha per tahun) b. Jumlah Pulau-Pulau Kecil Termasuk pulau kecil terluar yang dikelola (2 pulau per tahun) c. Rasio Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Perikanan (1:5)	SOP	a. Meningkatkan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara terpadu b. Menyempurnakan sistem penataan ruang nasional dengan memasukkan wilayah laut sebagai satu kesatuan dalam rencana penataan ruang nasional/regional c. Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Aksi Pembangunan Kelautan dan Maritim untuk penguasaan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan maritim untuk kesejahteraan rakyat d. Meningkatkan sarana prasarana, cakupan pengawasan, dan peningkatan kelembagaan serta sistem pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan f. Mengintensifkan penegakan hukum dan pengendalian <i>Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing</i> serta kegiatan yang merusak sumberdaya kalautan dan perikanan kewenangan 12 mil. g. Peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana perikanan. h. Penataan sistem perizinan usaha perikanan tangkap. i. Peningkatan penertiban ketaatan kapal di Pelabuhan Perikanan.	Penegakan hukum dan sanksi pidana pelanggaran hukum pidana perikanan	⇨ Dalam rangka pengembangan usaha , masih sulit akses dukungan permodalan usaha dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya

*Rencana Strategis Perubahan 2013-2018*

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan
			Internal (Kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan)	Eksternal (Diluar Kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>EKONOMI KEMARITIMAN DAN KELAUTAN</b>	a. Kontribusi PDRB Perikanan terhadap PDRB Sulsel (%) : 6,9% b. Produksi Perikanan 2.495.536,3 ton: c. Nilai Produksi Perikanan (Rp.1.000) 9.307.278.381 d. Nilai Ekspor US \$ Juta 200,24 e. Jumlah Tenaga Kerja Perikanan 799.493 orang	SPM SOP ISO 9001:2008 SNI	a. Peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi teknologi perikanan. b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan. c. Penyempurnaan tata kelola perikanan. d. Pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir. f. Penyediaan data dan informasi sumberdaya kelautan yang terintegrasi ( <i>one map policy</i> ) dalam rangka mendukung pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. h. Pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya hayati laut. i. Pengembangan SDM dan IPTEK kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan dan budaya bahari. j. Peningkatan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir. k. Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar Wilayah b. Pengembangan Wirausaha melalui koperasi c. Kerjasama KADIN, BKPM, Perindag dan lembaga usaha lainnya	✦ Jumlah SDM bergantung pada kegiatan usaha ✦ Aspek kualitas SDM dan kelembagaan ✦ Penguatan teknologi dan infrastruktur untuk akses informasi ✦ Rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan yang disebabkan oleh struktur armada penangkapan ikan yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil

*Rencana Strategis Perubahan 2013-2018*

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan
			Internal (Kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan)	Eksternal (Diluar Kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	a. Luas Kawasan konservasi laut dan perairan (2 ha per tahun) b. Jumlah Pulau-Pulau Kecil Termasuk pulau kecil terluar yang dikelola (2 pulau per tahun) c. Rasio Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Perikanan (50%) d. Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman e. Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	SOP	a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis b. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil. c. Pengelolaan perikanan berkelanjutan	a. Kebijakan dan regulasi lintas sektor tentang pengelolaan kawasan konservasi laut dan perairan b. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim c. Peningkatan Ketahanan Masyarakat KP terhadap Perubahan Iklim	✦ Implementasi kebijakan tata ruang untuk pengembangan perikanan budidaya ✦ Pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan baik akibat aktivitas perikanan budidaya maupun perikanan tangkap ✦ Penataan dan Pengelolaan Ruang Pesisir ✦ Gejala over fishing ✦ Implementasi kebijakan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Selanjutnya analisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dari faktor-faktor eksternal seperti yang termuat di tabel bawah ini.

**Tabel.3.2**  
**Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)**

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persaingan Pasar Global dan Industrialisasi	Rendahnya Produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan	Keterbatasan infrastruktur perikanan budidaya, tangkap dan pengolahan hasil kelautan & perikanan: Jaringan Saluran Irigasi, Jalan Tani Tambak, Air bersih, Listrik ,BBM, Sistem Rantai Dingin, Pelabuhan Perikanan	Kualitas Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah
2	Persyaratan kualitas/mutu produk perikanan seperti persyaratan label, kemasan dan keamanan produk	Belum terintegrasinya sistem produksi dari hulu ke hilir	Kemiskinan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan	Kesenjangan Gender pada SDM kelompok Usaha Perikanan
3	Proteksi produksi perikanan oleh negara maju	Persaingan Konsumsi protein hewan lain	Kualitas armada kapal penangkap ikan masih rendah	Kemiskinan
4	IUU Fishing CPUE (Catch Per Unit Estimation)	Penurunan Stok Ikan	Terbatasnya akses permodalan untuk usaha perikanan	Reklamasi pantai
5	Isu Lingkungan		Inovasi teknologi pada usaha perikanan	Degradasi Lingkungan

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Hasil identifikasi Dinas Kelautan dan Perikanan tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan dan berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

**Tabel. 3.3**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan**  
**Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan**  
**Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan**

Visi Sulawesi Selatan :				
Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018				
No	Misi dan Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<b>Pilar Utama Pembangunan Nasional</b>	a. Belum terintegrasinya sistem produksi dari hulu ke hilir b. Struktur dan Kualitas prasarana dan sarana penangkapan ikan c. Hama dan Virus Penyakit d. Mutu Produksi perikanan kurang berdaya saing e. Kualitas SDM f. Persaingan konsumsi protein hewan lain g. Degradasi sumberdaya Ekosistem dan Sumberdaya Ikan h. Kesenjangan Gender dalam pembinaan kelembagaan kelompok usaha perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan potensi belum berbasis kawasan</li> <li>• Pembenahan Sistem dan Manajemen usaha kelembagaan</li> <li>• Kurangnya data dan Informasi pasar dalam pengembangan usaha</li> <li>• Modal Usaha dan Akses Permodalan</li> <li>• Kualitas SDM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi sumberdaya yang cukup besar</li> <li>• Penerapan teknologi serta membangun jejaring bisnis</li> <li>• Pengendalian pemanfaatan Ekosistem Laut , Perairan Umum dan Sumberdaya Ikan</li> <li>• Rekstrukturasasi prasarana, sarana dan pengembangan teknologi penangkapan ikan</li> <li>• Revitalisasi Sistem Produksi</li> <li>• Dukungan Pembiayaan dan Komitmen</li> <li>• Peningkatan mutu dan jaminan keamanan pangan</li> <li>• Pelatihan dan bimtek</li> </ul>
	Misi 2 : Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan			
	Program a. Pengembangan Perikanan Budidaya b. Pengelolaan Perikanan Tangkap c. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Pulau-Pulau Kecil serta Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan d. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan			
2	<b>Pusat Jejaring</b>			
	Misi 4 :Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global Program : a. Optimalisasi Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran produk perikanan			
3	<b>Akselerasi Kesejahteraan</b>			
	Misi 7 : Meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik. Program : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, b. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD, c. Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Evaluasi Capaian Kinerja			

Dari 7 Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat 3 Misi yang didukung oleh pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

- Misi ke-2 **"Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan"** .

Pada pelaksanaan Misi ke-2 diarahkan pada Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Konservasi sumberdaya Kelautan dan Perikanan , Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Program-program tersebut dalam pelaksanaannya mengutamakan pengarusutamaan gender.

- Misi ke -3 **"Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global"**

Pada pelaksanaan Misi ke-3 diarahkan pada Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan

- Misi ke -7 **"Meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik"**

Pada pelaksanaan Misi ke-7 diarahkan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD, Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Evaluasi Capaian Kinerja.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Analisis Renstra K/L dan SKPD Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:

1. **Kedaulatan (Sovereignty)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. **Keberlanjutan (Sustainability)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. **Kesejahteraan (Prosperity)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk mengetahui sejauhmana tingkat capaian kinerja Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan melebihi sasaran Renstra K/L atau rata-rata Kabupaten/Kota maka perlu dilakukan analisis seperti pada tabel 3.4.

**Tabel 3.4.**  
**Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		Capaian Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi (Akumulasi capaian Renstra Kab/Kota)	Capaian Sasaran pada Renstra K/L
<i>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</i>					
1	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	1	Nilai Tukar Nelayan	106,4	112
		2	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	106,5	105
		3	Rata-rata pendapatan pengolah & pemasar (KK/bulan)	Rp1,6 juta	Rp2,0 juta
		4	Rata-rata pendapatan petambak garam (KK/bulan)	Rp1,8 juta	Rp2,0 juta
		5	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	33,4%	7.25%
<i>CUSTOMER PERSPECTIVE</i>					
2	Meningkatnya ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang bernilai tambah	6	Jumlah produksi perikanan tangkap (Jt Ton)	0,302	6.08
		7	Jumlah produksi perikanan budidaya ( Jt Ton)	3,08	13.97
		8	Jumlah produk olahan hasil perikanan ( Jt Ton)	--	5.2
		9	Jumlah produksi garam rakyat (Jt Ton)	0.127	3.3
		10	Nilai produk KP non konsumsi pada tingkat pedagang besar (Rp triliun)	--	2
3	Meningkatnya pemasaran produk kelautan dan perikanan di dalam dan luar negeri	11	Nilai ekspor produk perikanan (USD miliar)	0,296	5.65
		12	Konsumsi ikan per kapita	46,8	38.00
4	Meningkatnya pengelolaan SDKP secara berkelanjutan	13	Proporsi tangkapan perikanan laut berada dalam batasan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB)	<100%	<100%
		14	Jumlah jenis ikan yang dikonservasi secara berkelanjutan	10 jenis	15 jenis
		15	Jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang dikelola	4	30
		16	Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	2 juta ha	4,5 juta ha
5	Meningkatnya kesiapan masyarakat untuk usaha dan kesempatan kerja di bidang KP	17	Jumlah tenaga kerja baru di sektor KP (orang)	370.296	226.052
<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>					
6	Tersedianya kebijakan kelautan dan perikanan yang implementatif	18	Rasio jumlah kajian yang dijadikan bahan kebijakan terhadap total kajian yang dihasilkan	--	33%
		19	Persepsi masyarakat KP terhadap kebijakan yang diterbitkan KKP (dalam skala likert 1-5)	--	3
7	Terselenggaranya modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan yang optimal dan bermutu	20	Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat (unit)	48	265

*Rencana Strategis Perubahan 2013-2018*

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		Capaian Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi (Akumulasi capaian Renstra Kab/Kota)	Capaian Sasaran pada Renstra K/L
		21	Jumlah unit pembudidayaan ikan tersertifikasi dan memenuhi standar (unit)	4	10
		22	Rasio kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap, dan laik simpan	48,7%	51,0%
		23	Rasio pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional	13	75
		24	Utilitas UPI (%)	--	75
		25	Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra	--	≤ 10
		26	Persentase jumlah produksi garam rakyat Kualitas Produksi (KP1) dibandingkan total produksi	50% : 50%	80% : 20%
		27	Rasio jumlah peserta yang dididik, dilatih, dan disuluh yang kompeten di bidang KP terhadap total peserta	61.67%	65%
		28	Jumlah hasil litbang yang inovatif	87	90
8	Terselenggaranya pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum	29	Wilayah perairan bebas IUU fishing dan kegiatan yang merusak SDKP	4	39
		30	Ketaatan unit usaha perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	87.13%	97.50%
		31	Persentase jumlah nelayan Indonesia yang diadvokasi	---	100%

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pencapaian kinerja Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sudah baik secara nasional dan regional. Namun berdasarkan hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Kab/Kota tahun rencana ditujukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Kab/Kota maka perlu diketahui faktor-faktor penghambat maupun pendorong. Untuk mengidentifikasi faktor tersebut maka dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel.3.5**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan**  
**berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong**  
**Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kontribusi PDRB Perikanan terhadap PDRB (%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur dan kualitas prasarana dan sarana penangkapan ikan</li> <li>• Maraknya kegiatan penangkapan ikan secara illegal</li> <li>• Rusaknya kelestarian lingkungan akibat illegal fishing</li> <li>• Keterwakilan jumlah perempuan dalam pengembangan SDM usaha perikanan masih kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana dan prasarana penangkapan yang digunakan nelayan masih tradisional</li> <li>• Mata pencaharian nelayan bergantung pada SDA laut dan perairan umum</li> <li>• Pola budidaya masih tradisional</li> <li>• Kualitas SDM</li> <li>• Paradigma pergeseren kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumberdaya Kelautan memiliki Potensi cukup besar</li> <li>• Potensi Kelembagaan</li> <li>• Dukungan Pembiayaan dan Komitmen Penganggaran</li> <li>• Kebijakan ekonomi serta ikim sosial politik yang kondusif</li> </ul>
2	Produksi Perikanan (ton)			
	a.Perikanan Tangkap			
	b.Perikanan Budidaya			
3	Konsumsi Ikan (kg/kap/th)			
4	Ekspor Hasil Perikanan (USD 1000/tahun)			
5	Nilai Tukar Nelayan/ Pembudidaya Ikan			
6	Luas Kawasan konservasi laut dan perairan (ribu ha per tahun)			
7	Jumlah Pulau-Pulau Kecil Termasuk pulau kecil terluar yang dikelola (pulau per tahun)			
8	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas yang aktif (Klp)			

### 3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Dibandingkan dengan struktur dan pola eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan,

dan prioritas wilayah pelayanan dalam lima tahun mendatang. Sehingga rancangan program beserta targetnya dapat disusun sesuai dengan RTRW tersebut.

Dalam rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis terlihat bahwa pola penggunaan dan pemanfaatan kawasan dititik beratkan pada konsep agribisnis perikanan yang terdiri dari sub-sistem agribisnis hulu (*up-stream agribusiness*) berupa ragam kegiatan industri dan perdagangan sarana produksi perikanan, sub-sistem budidaya/penangkapan (*on-farm agribusiness*) yang menghasilkan komoditas perikanan, sub-sistem agribisnis hilir (*down-stream agribusiness*) berupa ragam kegiatan industri pengolahan hasil perikanan dan pemasaran, dan sub-sistem jasa penunjang (*supporting institution*) yang mendukung pengembangan semua sub-sistem, meliputi : perbankan, transportasi, penelitian dan pengembangan, kebijakan pemerintah, penyuluhan, dan lain-lain. Semua sub-sistem berada dalam simpul keterkaitan fungsional yang saling mendukung dalam eksistensi sistem yang terpadu dalam berakselerasi mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Struktur tata ruang menentukan kualitas interkoneksi antar simpul-simpul wilayah dalam kawasan, sekaligus merupakan suatu komunitas yang utuh yang memungkinkan sebuah kawasan berartikulasi secara optimal terhadap dinamika lingkungan eksternalnya. Untuk mengintegrasikan titik-titik ruang, maka dibuat struktur ruang berdasarkan fungsinya masing-masing. Secara garis besar, rencana struktur ruang Kawasan Minapolitan di Kabupaten/Kota terdiri atas beberapa orde, yaitu : Pusat Satuan Kawasan Perikanan, Pusat Distrik Minapolitan (pusat pertumbuhan), Kota Tani Utama/Minapolis (sentra produksi), wilayah-wilayah hinterland, dan kota pemasaran (outlet).

Mengacu kepada penajaman visi dan misi pembangunan daerah maka perspektif tujuan telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi dalam rangka pengembangan kawasan minapolitan dan industrialisasi dengan mengakselerasi pencapaian visi pembangunan nasional dan daerah. Dari hasil penelaahan terhadap rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dapat dikemukakan faktor penghambat dan pendorong pada tabel 3.6 dan tabel 3.7

Rencana Struktur Tata Ruang menentukan interkoneksi antar simpul-simpul wilayah dalam kawasan, secara garis besar rencana struktur ruang kawasan minapolitan dikabupaten/kota terdiri atas : Pusat satuan kawasan perikanan, pusat distrik minapolitan (pusat pertumbuhan), kota minapolis (Sentra produksi), wilayah-wilayah hinterland, dan kota pemasaran (outlet). Mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029, Rencana pengembangan kawasan strategis nasional dan kawasan budidaya nasional dengan sektor unggulan Perikanan meliputi :

#### **1. Kawasan Andalan Darat**

- a. Kawasan andalan Mamminasata dan sekitarnya

- b. Kawasan andalan Palopo dan sekitarnya
- c. Kawasan andalan Bulukumba-Watampone dan sekitarnya
- d. Kawasan andalan Pare-pare dan sekitarnya

**2. Kawasan Andalan Laut**

- Kawasan andalan Laut Kapoposan dan sekitarnya
- Kawasan andalan Laut Teluk Bone dan sekitarnya
- Kawasan andalan Laut Singkarang – Takabonerate dan sekitarnya
- Kawasan andalan Laut Selat Makassar dan sekitarnya

**3. Kawasan potensial yang merupakan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)**

Dimanfaatkan untuk budidaya unggulan meliputi

- a. Kawasan potensial budidaya Rumput Laut meliputi wilayah perairan pantai dan tambak di masing-masing kabupaten : Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Luwu, Palopo, Luwu Utara, dan Luwu Timur.
- b. Kawasan potensial budidaya udang bandeng meliputi tambak-tambak di masing-masing kabupaten : Pinrang, Barru, Pangkep, Bone dan Wajo
- c. Kawasan potensial perikanan tangkap meliputi Selat Makassar, Laut Flores dan Teluk Bone

**4. Kawasan Wisata Bahari yang merupakan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)**

- a. Kawasan wisata bahari Mamminasata dan sekitarnya (kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Pangkep)
- b. Kawasan Wisata bahari Takabonerate (Kabupaten Kepulauan Selayar)

**5. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Pola Ruang**

Peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau disusun dengan memperhatikan :

- a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan wisata alam
- b. Ketentuan pelarangan pemanfaatan kayu bakar; dan
- c. Ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah mengurangi luas dan atau mencemari ekosistem bakau.

Peraturan zonasi untuk taman nasional dan taman nasional laut disusun dengan memperhatikan :

- a. Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam
- b. Pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat
- c. Ketentuan pelarangan kegiatan budidaya di zona inti

- d. Ketentuan pelarangan kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga.

Peraturan zonasi untuk terumbu karang disusun dengan memperhatikan

- a. Pemanfaatan untuk pariwisata bahari
- b. Ketentuan pelarangan kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang
- c. Ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf b yang dapat menimbulkan pencemaran air

#### **6. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Budidaya**

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan perikanan disusun dengan memperhatikan :

- a. Pemanfaatan ruang untuk pemukiman pembudidaya dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah
- b. Pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan atau kawasan hijau
- c. Pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari.

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukkan industri disusun dengan memperhatikan :

- a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia di wilayah sekitarnya
- b. Pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukkan industri

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki sumber daya pesisir yang cukup potensial dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah. Berbagai potensi tersebut seperti perikanan, pariwisata, perhotelan, kepelabuhan, dan industri pesisir. Mengingat potensi yang besar tersebut, maka dalam pengelolaannya perlu dilakukan secara terpadu (Integrated Coastal Management) dengan melibatkan semua stakeholder terkait. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir belum dilaksanakan secara optimal.

Potensi sumber daya pesisir tersebut telah mengalami degradasi ekosistem terutama populasi ikan dan biota lainnya yang cukup terdapat didalamnya sebagai akibat dari dampak laju pertumbuhan penduduk, kegiatan pembangunan fisik, peningkatan sampah organik dan anorganik serta kegiatan-kegiatan illegal dalam industri perikanan, pertambangan, dan pembalakan.

Peningkatan konsumsi dan pemanfaatan sumberdaya pesisir yang berlebihan, tanpa mempertimbangkan aspek pelestarian lingkungannya, akan semakin menurunkan daya lingkungan dan nilai serta keberadaan potensi sumberdaya pesisir, sehingga mengancam potensi ekonomi dan sosial budaya yang terkandung didalamnya. Hal ini

tentunya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan, karena sebagian masyarakat lokal yang berdomisili di wilayah pesisir di Sulsel bermata pencaharian sebagai nelayan yang menggantungkan kehidupannya pada sumberdaya pesisir, khususnya kegiatan perikanan sebagai sumber pendapatan utamanya.

Faktor pendorong yang diperkirakan akan mempengaruhi kecenderungan masa depan :

1. Meningkatnya degradasi ekosistem sumberdaya alam di wilayah pesisir termasuk laju degradasi mangrove semakin hari meningkat seiring dengan meningkatnya eksploitasi terutama alih fungsi (konversi) untuk tujuan lain seperti tambak dan pemukiman
2. Penangkapan ikan
3. Pencemaran laut

Perkiraan dampak negatif dan positif faktor pendorong terhadap kecendrungan masa depan dimana saat ini ekosistem dominan di wilayah pesisir Sulawesi Selatan seperti :

1. Ekosistem mangrove dan terumbu karang sedang mengalami kerusakan yang sangat berat.
2. Dari total kerusakan terumbu karang sebesar 42%, 29 % rusak, 23% baik dan hanya 6% yang sangat baik.
3. Pada umumnya kerusakan tersebut hancur akibat masih maraknya kegiatan illegal fishing dan pola penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan yang dilakukan para nelayan untuk menangkap ikan sehingga sejumlah habitat lainnya yang berada disekitar kawasan lokasi penangkapan ikanpun ikut rusak.
4. Masih terdapat terumbu karang yang dapat diselamatkan hal tersebut disebabkan karena lokasinya berada daerah pesisir yang dilindungi pemerintah sehingga akses masyarakat terbatas pada lokasi – lokasi tersebut.
5. Laju degradasi mangrove semakin hari semakin meningkat seiring dengan maraknya eksploitasi terutama alih fungsi (konversi) untuk tujuan lain seperti tambak dan pemukiman. Jumlah total hutan mangrove seluas 22.35 ha, diperkirakan 40% yang telah mengalami gangguan dan dalam proses dijadikan tambak. Hutan mangrove tersebut tersebar di 18 kab/ kota.
6. Kerusakan memanjang dari wilayah pesisir pantai barat yang mencakup kabupaten Pangkep, Maros, Takalar hingga kewilayah pantai timur, mulai dari Kabupaten Sinjai hingga daerah Luwu.

Ketika hutan mangrove rusak, maka ekosistem disekitarnya juga akan rusak dan bahkan pengaruhnya bisa berakibat luas yaitu terjadi kepunahan ekosistem. Bila pemerintah setempat melakukan pembiaran dikhawatirkan keberlangsungan ekosistem laut akan punah

dan kerusakan habitat laut lainnya dan diyakini akan berdampak pada kehidupan disekitarnya khususnya para nelayan. Hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan nelayan sebagai masyarakat lokal yang berdomisili di wilayah pesisir di Sulawesi Selatan yang bermata pencaharian sebagai nelayan yang menggantungkan kehidupannya pada sumberdaya pesisir khususnya kegiatan perikanan sebagai sumber pendapatan utamanya dimana 80% masyarakat pesisir adalah masyarakat miskin dengan tingkat pendidikan rendah. Disisi lain dengan semakin berkurangnya populasi ikan dikawasan pesisir mengakibatkan hasil tangkapan nelayan pun semakin berkurang dan membuat nelayan terpaksa mencari ikan pada jarak yang semakin jauh melewati wilayah laut. Semakin bertambah besarnya biaya operasional para nelayan dikhawatirkan kondisi tersebut dapat mengakibatkan konflik antar nelayan yang saling memperebutkan lokasi penangkapan ikan. Dengan demikian diperlukan perhatian lebih dari pemerintah untuk mengatur dan mengelolah wilayah pesisir ini agar nelayan menangkap ikan tanpa merusak ekosistem lainnya dan terlibat konflik sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan mencoba sumber mata pencaharian baru seperti pengembangan rumput laut dll.

**Tabel.3.6**

**Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengembangan Kawasan			
2	Produksi Perikanan (ton)			
	a.Perikanan Tangkap	Struktur dan kualitas prasarana dan sarana penangkapan ikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarana dan prasarana penangkapan yang digunakan nelayan masih tradisional</li> <li>Mata pencaharian nelayan bergantung pada SDA laut dan perairan umum</li> </ul>	Pengendalian pemanfaatan ekosistem laut, perairan umum dan sumberdaya ikan melalui restrukturisasi prasaranan, sarana dan pengembangan teknologi penangkapan ikan
	b.Perikanan Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jaringan Irigasi terbatas</li> <li>Pemanfaatan Lahan yang tidak sesuai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pola budidaya masih tradisional</li> <li>Kualitas SDM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Potensi Lahan Perikanan Budidaya</li> <li>Dukungan Pembiayaan</li> <li>Penetapan Kawasan Minapolitan</li> </ul>
3	Komoditas Unggulan <ul style="list-style-type: none"> <li>Udang</li> <li>Rumput Laut</li> <li>Bandeng</li> <li>Tuna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lahan</li> <li>Sarana prasarana</li> <li>SDM</li> <li>Infrastruktur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penataan tata ruang budidaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan dan regulasi</li> <li>Perencanaan dan Evaluasi</li> </ul>
4	Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penataan Zonasi Kawasan dan Ruang untuk sektor unggulan perikanan belum terakomodir</li> <li>Sistem Logistik Ikan</li> </ul>	Belum tersosialisasinya Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan dan Regulasi kebijakan seperti Perda, Pergub dan lain sebagainya</li> <li>Penataan perencanaan dan sinergitas antar lintas sektor</li> </ul>
5	Ekspor Hasil Perikanan (USD 1000/tahun)	Penataan kawasan industri pengolahan perikanan masih berdekatan dengan pemukiman	Sinergitas Perencanaan antara pemerintah kab/kota dengan pemerintah provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan dan Regulasi kebijakan seperti Perda, Pergub dan lain sebagainya</li> <li>Penataan perencanaan dan sinergitas antar lintas sektor</li> </ul>
5	Nilai Tukar Nelayan/ Pembudidaya Ikan	Indeks penerimaan nelayan/pembudidaya berfluktuasi setiap bulannya sehingga tidak memberikan dampak yang cukup besar terhadap kesejahteraan nelayan/pembudidaya	Belum tersosialisasinya Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan dan Regulasi kebijakan seperti Perda, Pergub dan lain sebagainya</li> <li>Penataan perencanaan dan sinergitas antar lintas sektor</li> </ul>

*Rencana Strategis Perubahan 2013-2018*

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Luas Kawasan konservasi laut dan perairan (ribu ha per tahun)	Lemahnya kerangka hukum dalam hal pengaturan sumberdaya Pesisir	Belum tersosialisasinya Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan dan Regulasi kebijakan seperti Perda, Pergub dan lain sebagainya</li> <li>• Penataan perencanaan dan sinergitas antar lintas sektor</li> </ul>
7	Jumlah Pulau-Pulau Kecil Termasuk pulau kecil terluar yang dikelola (pulau per tahun)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Tata Ruang tidak berdasarkan kebutuhan dan urgensi</li> <li>• Kurangnya informasi dan data meliputi data fisik, ekonomi dan sosial terutama gambaran karakteristik kawasan dipulau tersebut</li> <li>• Kerusakan kawasan pesisir dan ekosistemnya</li> </ul>	Koordinasi lintas sektor dalam hal penataan dan pemulihan ekosistem (BLH, Dishut dan Bapedalda)	Mempertahankan Mangrove yang ada sekaligus mengembangkannya sebagai usaha perlindungan dan pemulihan ekosistem wilayah
8	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas yang aktif (Klp)	Kualitas Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SDM Kelompok Pengawas yang belum memahami Tugas dan Fungsi Kelembagaan</li> <li>• Sarana pengawasan yang belum memadai</li> <li>• Kelembagaan yang belum memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bimtek secara periodik</li> <li>• Dukungan Pembiayaan</li> </ul>

Situasi terburuk yang diperkirakan akan terjadi jika semakin meningkatnya kegiatan illegal fishing dan pola penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dikhawatirkan ketergantungan ekosistem laut akan punah dan kerusakan habitat lautpun diyakini akan berdampak pada kehidupan disekitarnya khususnya pada nelayan. Situasi terburuk yang diperkirakan akan terjadi jika semakin meningkatnya laju degradasi mangrove dikhawatirkan akan berdampak pada rusaknya ekosistem pesisir, hilangnya habitat satwa daratan dan lautan, hilangnya pulau, kematian dari berbagai jenis satwa dan flora serta dampak – dampak lingkungan lainnya seperti abrasi, intrusi, banjir dan kematian organisme perairan serta mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir.

**Tabel.3.7**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan**  
**berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong**  
**Keberhasilan Penanganannya**

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<b>Produksi Perikanan (ton)</b>			
a.	<b>Perikanan Tangkap</b>	Maraknya penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan bus sehingga merusak lingkungan dan ekosistem sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan dan Kapasitas SDM nelayan terhadap teknologi alat tangkap, target tangkapan, &amp; daerah penangkapan ikan masih rendah</li> <li>• Teknologi penangkapan ikan sangat konvensional dan sulit berubah.</li> <li>• Sarana dan prasarana tempat pendaratan ikan serta fasilitas kebutuhan melaut (operasi penangkapan ikan) masih sangat terbatas</li> <li>• Penanganan dan pengolahan ikan belum menjadi perhatian yang serius (terkesan seadanya)</li> <li>• Mekanisme dan jaringan pemasaran masih sangat konvensional, dengan metode transaksi langsung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semangat etos kerja nelayan yang sangat kuat</li> <li>• Potensi sumberdaya perikanan belum dimanfaatkan secara optimal</li> <li>• Kebutuhan pasar akan pangan sumberdaya ikan semakin meningkat</li> <li>• Perhatian terhadap Perbaikan infrastruktur pendukung serta sarana dan prasarana perikanan tangkap semakin besar</li> </ul>
b.	<b>Perikanan Budidaya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hama dan Virus</li> <li>• Anomali Iklim</li> <li>• Kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan tambak baru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pola budidaya masih tradisional</li> <li>• Kualitas SDM</li> <li>• Eksploitasi yang berlebihan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan Pembiayaan</li> <li>• Penyuluhan</li> </ul>
2	Komoditas Unggulan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udang</li> <li>• Rumput Laut</li> <li>• Bandeng</li> <li>• Tuna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lahan</li> <li>• Sarana prasarana</li> <li>• SDM</li> <li>• Infrastruktur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stock ikan</li> <li>• Jalur penangkapan ikan</li> <li>• Kesadaran masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi Perikanan</li> <li>• Kebijakan dan Regulasi</li> <li>• Perencanaan dan Evaluasi</li> </ul>
3	<b>Konsumsi Ikan (kg/kap/th)</b>	Rusaknya ekosistem akan mempengaruhi jumlah stock ikan sehingga akan berpengaruh pada ketersediaan pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimnya aturan dan regulasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyuluhan</li> <li>• Penyadaran Masyarakat (Public Awareness)</li> </ul>
4	<b>Ekspor Hasil Perikanan 1000/tahun)</b>	Limbah industri pengolahan ikan	Kawasan industri berbasis ramah lingkungan belum tersosialisasi dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyuluhan</li> <li>• Penyadaran Masyarakat (Public Awareness)</li> </ul>
5	<b>Nilai Tukar Nelayan/ Pembudidaya Ikan</b>	Keinginan pendapatan yang tinggi sehingga masyarakat tidak memperhatikan Penangkapan ikan dan cara budidaya yang kurang tepat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemiskinan</li> <li>• Kesenjangan Sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan program untuk peningkatan pendapatan</li> <li>• Penyadaran Masyarakat (Public Awareness)</li> </ul>
		<b>Permasalahan Pelayanan</b>	<b>Sebagai Faktor</b>	

No	Tugas dan Fungsi SKPD	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel	Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Luas Kawasan konservasi laut dan perairan (ribu ha per tahun)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulasi pengelolaan lingkungan konservasi terakomodir terkait belum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi lintas sektor dalam hal penataan dan pemulihan ekosistem (BLH, Dishut dan Bapedalda) belum sepenuhnya dilakukan</li> <li>Minimnya keikutsertaan masyarakat pesisir yang memperhatikan keterwakilan jumlah perempuan dalam pengelolaan SD pesisir dan kelautan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dilakukannya konservasi untuk mengembalikan Kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</li> <li>Mempertahankan Mangrove yang ada sekaligus mengembangkannya sebagai usaha perlindungan dan pemulihan ekosistem wilayah</li> <li>Menurunnya SD yaitu populasi ikan</li> </ul>
6	Jumlah Pulau-Pulau Kecil Termasuk pulau kecil terluar yang dikelola (pulau per tahun)	Degradasi lingkungan pesisir dan laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan iklim</li> <li>Keterbatasan akses dan jangkauan</li> <li>Konflik kepentingan tidak hanya terjadi antar sektoral dalam pemerintahan tetapi juga dgn masyarakat setempat dan pihak swasta sehingga tujuan dan pengembangan potensi sumberdaya pesisir dan lautan tidak akan tercapai</li> </ul>	Pemanfaatan SD pesisir dan pulau2 kecil yg intensif, optimal dan terkendali dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yg tinggi yg juga dapat memberikan keuntungan yg besar bagi kesejahteraan masyarakat pesisir
7	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas yang aktif (Klp)	Eksplorasi sumberdaya yang berlebihan	Kelembagaan kelompok yang belum sepenuhnya aktif dalam pengawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kearifan lokal</li> <li>Penyadaran Masyarakat (Public Awareness)</li> </ul>

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam penentuan Isu-Isu Strategis , maka perlu mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ditinjau dari :

#### 3.5.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2010 telah menggunakan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dalam rangka menjamin ketersediaan, keamanan pangan dan mutu hasil perikanan. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kelautan dan Perikanan didukung 4 bidang teknis dan 5 Unit Pelayanan Teknis Daerah yaitu bidang Perikanan Budidaya, Bidang Kelautan, Pesisir dan Perikanan Tangkap, Bidang Bina Mutu, Usaha dan Kelembagaan, Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautandan Perikanan,UPTD Pengembangan dan Pembinaan Mekanisasi Perikanan Tangkap, UPTD Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, UPTD Pengembangan dan Pembinaan Budidaya Payau

dan Laut, UPTD Pengembangan dan Pembinaan Budidaya Air Tawar serta UPTD Pembinaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

### **3.5.2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L**

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, KKP menjabarkan 3 misi yakni “**Kedaulatan**”, “**Keberlanjutan**”, dan “**Kesejahteraan**” dan menggunakan pendekatan metoda *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni *stakeholders prespective*, *customer prespective*, *internal process prespective*, dan *learning and growth prespective*, sebagai berikut:

#### **1. Stakeholders Prespective**

Menjabarkan misi “Kesejahteraan”, maka sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP”, dengan Indikator Kinerja :

- a. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dari 40,5 pada tahun 2015 menjadi 51 pada tahun 2019.
- b. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7% pada tahun 2015 menjadi 12% pada tahun 2019.

#### **2. Customer Prespective**

Menjabarkan misi “Kedaulatan”, maka sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP”, dengan Indikator Kinerja :

- a. Persentase Kepatuhan (*Compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dari 70% pada tahun 2015 menjadi 87% pada tahun 2019.
- b. Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri dari 5 pulau pada tahun 2015 menjadi 25 pulau pada tahun 2019.

Selanjutnya, menjabarkan misi “Keberlanjutan”, maka sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja :

- a. Nilai Pengelolaan Wilayah Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan dari 0,20 pada tahun 2015 menjadi 0,65 pada tahun 2019.
- b. Nilai Peningkatan Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dari 0,59 pada tahun 2015 menjadi 1,0 pada tahun 2019.
- c. Produksi perikanan, dari 24,12 juta ton pada tahun 2015 menjadi 39,97 juta ton pada tahun 2019.
- d. Produksi garam rakyat, dari 3,3 juta ton pada tahun 2015 menjadi 4,5 juta ton pada tahun 2019.

- e. Nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 5,86 miliar pada tahun 2015 menjadi USD 9,54 miliar pada tahun 2019.
- f. Konsumsi ikan, dari 40,9 kg/kapita/thn pada tahun 2015 menjadi 54,49 kg/kapita/thn pada tahun 2019.
- g. Persentase peningkatan PNBPN dari sektor KP dari 5% pada tahun 2015 menjadi 15% pada tahun 2019.

### **3. Internal Process Perspective**

Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses yang harus dilakukan oleh KKP, yakni :

- a. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif”, dengan Indikator Kinerja Indeks efektivitas kebijakan pemerintah, dari 6 pada tahun 2015 menjadi 8 pada tahun 2019.
- b. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja Efektivitas Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan, dari 70% pada tahun 2015 menjadi 95% pada tahun 2019.
- c. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif”, dengan Indikator Kinerja:
  - Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu dari 56,6% pada tahun 2015 menjadi 83,36% pada tahun 2019.
  - Tingkat Keberhasilan Pengawasan di Wilayah Perbatasan dari 70% pada tahun 2015 menjadi 87% pada tahun 2019.

#### **3.5.3. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Provinsi**

- 1. **Peningkatan Produksi Perikanan** tahun 2013 sebesar 2.684.006.6 ton menjadi 4.906.673 ton pada tahun 2018
  - Produksi Perikanan Budidaya tahun 2013 sebesar 2.391.769 ton menjadi 4.599.528 ton pada tahun 2018
  - Produksi Perikanan Tangkap tahun 2013 sebesar 292.237.6 ton menjadi 307.145 ton pada tahun 2018
- 2. **Peningkatan Produksi Komoditi Unggulan**
  - Udang tahun tahun 2013 sebesar 34.402.7 ton menjadi 47.615 ton pada tahun 2018

- Rumput Laut tahun 2013 sebesar 2.422.154.2 ton menjadi 4.280.366 ton pada tahun 2018
- Bandeng tahun 2013 sebesar 91.502.3 ton menjadi 24.078 ton pada tahun 2018

**3. Peningkatan Ekspor Hasil perikanan**

- Volume Ekspor tahun 2013 sebesar 98.276 ton menjadi 164.945 ton pada tahun 2018
- Nilai Ekspor tahun 2013 sebesar US\$ 221.000 juta menjadi US\$ 353.427 juta pada tahun 2018

**4. Konsumsi Ikan (kg/kap) tahun 2013 sebesar 44,3 kg/kap menjadi 46,6 kg/kap pada tahun 2018**

**5. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya**

- Nilai Tukar Nelayan (NTN) tahun 2013 sebesar 102.8 menjadi 104.1 pada tahun 2018
- Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) tahun 2013 sebesar 107.7 menjadi 108.5 pada tahun 2018

**6. Jumlah Tenaga Kerja**

- Jumlah tenaga kerja Perikanan Tangkap tahun 2013 sebesar 128.611 menjadi 135.171 pada tahun 2018
- Jumlah tenaga kerja Perikanan Budidaya tahun 2013 sebesar 289.847 menjadi 510.809 pada tahun 2018
- Jumlah tenaga kerja Pengolahan tahun 2013 sebesar 40.010 menjadi 68.131 pada tahun 2018
- Jumlah tenaga kerja Pemasar tahun 2013 sebesar 285.877 menjadi 514.536 pada tahun 2018

**3.5.3. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pengembangan industrialisasi dan kawasan minapolitan, maka kawasan dikembangkan melalui :

- a) Mengembangkan komoditi unggulan dan komoditi penunjang melalui sistem agribisnis dengan pola klaster (*cluster*).

- b) Mengelompokkan dan menentukan struktur ruang berdasarkan keunggulan masing-masing wilayah dalam kawasan.
- c) Mengembangkan prasarana dan sarana yang dapat meningkatkan sinergitas kegiatan dalam kawasan.
- d) Mengelompokkan dan menentukan pola ruang kawasan berdasarkan zona-zona kawasan.

### **3.5.2 Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan**

Sesuai dengan klausul yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen pendukung dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. KLHS merupakan *self assesment* untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang diusulkan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. KLSH diperlukan karena prinsip pembangunan berkelanjutan perlu terintegrasikan dalam pengambilan keputusan melalui informasi yang lebih komprehensi tentang lingkungan hidup. Fakta menunjukkan bahwa laju degradasi sumberdaya lahan dan kualitas lingkungan hidup semakin meningkat, dan umumnya bersifat kausalitas lintas wilayah dan antar sektor. Oleh karena itu, diperlukan instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang memungkinkan penyelesaian masalah yang bersifat berjenjang (dari pusat ke daerah), lintas wilayah dan antar sektor. Salah satu sumber permasalahan degradasi sumberdaya lahan dan kualitas lingkungan hidup berawal dari proses pengambilan keputusan, sehingga perlu upaya penanggulangan degradasi sumberdaya lahan dan kualitas lingkungan hidup .

Berdasarkan dari faktor-faktor permasalahan pelayanan dan implikasi RTRW dan KLHS, maka dilakukan analisis penilaian isu strategis dengan menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan.

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1. Visi dan Misi**

Visi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Perumusan Visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah (PPD) untuk menemukan perwujudan visi. Berbagai permasalahan pembangunan yang berhubungan layanan atau peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan. Visi Dinas Kelautan dan Perikanan dirumuskan berdasarkan tindak lanjut hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah (lampiran Bab IV). Sehingga pernyataan Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

**” Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan Masyarakat ”**

Visi tersebut merupakan penjabaran dari Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan.

**Tabel . 4.1.  
Penyusunan Penjelasan Visi**

<b>Visi</b>	<b>Pokok-Pokok Visi</b>	<b>Penjelasan Visi</b>
<b>”Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai pilar utama dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan Masyarakat”</b>	Pilar Utama pembangunan kelautan dan perikanan	Pilar Utama Pembangunan Kelautan dan Perikanan merupakan gambaran tentang posisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 berkontribusi terhadap perwujudan Ketahanan, Kemandirian, Kedaulatan Pangan, Pertumbuhan ekonomi daerah dan Kontribusi Nasional
	Simpul Jejaring	Simpul Jejaring merupakan gambaran tentang posisi Sulawesi Selatan tahun 2013 menempatkan diri sebagai pusat pertumbuhan, pelayanan dan jasa dengan mensinergikan potensi keunggulan kab/kota, kemajuan kabupaten dan kota serta bersinergi dengan perkembangan regional, nasional dan internasional
	Akselerasi Kesejahteraan Masyarakat	Akselerasi Kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran tentang proses perubahan pada masyarakat Sulawesi Selatan melalui Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagai langkah percepatan perwujudan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan

## *Rencana Strategis Perubahan 2013-2018*

Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Beberapa misi yang wajib dijadikan pegangan pelaksanaan tugas seluruh aparat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

- MISI I : Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- MISI II : Memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- MISI III : Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan;
- MISI IV : Mengembangkan SDM Kelautan dan Perikanan dan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih.

Misi Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan upaya untuk mewujudkan keadaan atau kondisi yang diinginkan.

### 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan dan memiliki keterkaitan dengan Visi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

**Tabel. 4.2.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Selatan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Kualitas Kemakmuran Ekonomi (Penguatan Kelembagaan) dan Kesejahteraan sosial) masyarakat pesisir	Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan	Volume produksi Perikanan	3,146,106	3,349,134	3,517,298	4,145,760	4,906,672
			1. Perikanan Budidaya	2,850,946	3,051,023	3,216,206	3,841,657	4,599,528
			2. Perikanan Tangkap	265,105	267,756	270,434	273,138	275,869
			Volume produksi garam rakyat (ton)	213,403	232,946	244,593	256,240	267,887
			Nilai Produksi Perikanan	<b>Rp.12.60 T</b>	<b>Rp.13.22 T</b>	<b>Rp. 13.74 T</b>	<b>Rp.15.58 T</b>	<b>Rp.17.81T</b>
			1. Perikanan Budidaya	Rp.8,21 T	Rp.8.78 T	Rp.9.26 T	Rp.11.06 T	Rp.13,24 T
			2. Perikanan Tangkap	Rp.4.39 T	Rp.4,43 T	Rp.4,478 T	Rp.4,52 T	Rp.4.56 T
			NTN	103.1	103.3	103.6	103.8	104.1
			NTPi	107.9	108.0	108.2	108.3	108.5
			Konsumsi Ikan (kg/kap)	44.7	45.2	45.6	46.1	46.6

*Rencana Strategis Perubahan 2013-2018*

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Tercukupinya akses dan kualitas layanan infrastruktur masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	Meningkatnya infrastruktur dasar dan layanan dasar pada masyarakat pesisir dan pulau2 kecil.	Jumlah Pulau- Pulau Kecil yang ekonominya dibina dan diberdayakan serta mendapatkan layanan infrastruktur (pulau)	4	6	8	10	12
3	Terjaganya kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	Meningkatnya Perlindungan Fungsi Lingkungan dan Penanganan Dampak Lingkungan Hidup	Luas Kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (%)	10	20	30	40	50
			Jumlah kasus penyelesaian dan penyidikan tindak pidana perikanan secara akuntabel dan tepat waktu	1 kasus	2 kasus	2 kasus	2 kasus	2 kasus
			Jumlah Pokmaswas yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan	120 klp	130 klp	140 klp	150 klp	160 klp
4	Terwujudnya peningkatan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global	Meningkatnya Iklim investasi berkualitas yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa	Volume ekspor hasil perikanan (ton)	103,170	142,563	149,665	157,119	164,945
			Nilai ekspor hasil perikanan (US\$.1000/thn)	247.250	311,160	326,660	342,930	353,427
5	5.1. Terwujudnya keberdayaan masyarakat dan kualitas pemerintahan desa  5.2. Terwujudnya pemerintahan yang baik	5.1.1 Meningkatkan Keterampilan dan inovasi pelaku usaha kelautan dan perikanan	Jumlah tenaga kerja perikanan memperhatikan keterwakilan jumlah perempuan dan laki-laki :	996,171	1,011,114	1,026,280	1,041,675	1,057,300
			1. Perikanan Tangkap (orang)	129,897	131,196	132,508	133,833	135,171
			2. Perikanan Budidaya (orang)	324,629	363,584	407,214	456,080	510,809
			3. Pengolahan (Orang)	44,011	48,121	58,121	68,121	68,131
			4. Pemasar Ikan (Orang)	326,285	366,610	406,378	452,118	514,536
			5. Petani Garam (Orang)	2,144	2,155	2,165	2,176	2,198
		5.2.1. Kelembagaan dan Tatalaksana Pemerintahan Daerah Yang Kuat dan Transparan dalam mendukung reformasi birokrasi	Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Disiplin Aparatur (orang)	245	249	252	256	260
			Jumlah Pelayanan Administrasi dan Jasa Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
		5.2.2. Pengelolaan keuangan (Pembiayaan, pendapatan dan belanja) yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib	Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor, pengelola keuangan dan administrasi kantor Dinas Kelautan dan Perikanan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
		5.2.3. Meningkatkan kapasitas dan pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan	Persentase kualitas SDM Aparatur dengan memperhatikan keterwakilan jumlah laki-laki dan perempuan pada Dinas Kelautan dan Perikanan	20%	20%	20%	20%	20%
5.2.4. Perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal	Dokumen perencanaan program kegiatan tepat waktu,	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok		

#### 4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah.

**Tabel 4.3.  
Penentuan Kebijakan**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya produksi perikanan dan produktivitas perikanan	1. Volume produksi Perikanan a. Perikanan Budidaya b. Perikanan Tangkap 2. Nilai Produksi Perikanan a. Perikanan Budidaya b. Perikanan Tangkap 3. Volume produksi garam rakyat (ton) 4. Indeks Nilai Tukar Nelayan (NTN) 5. Konsumsi Ikan (Kg/Kap)	1.1 Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Minapolitan 1.2 Pengembangan kluster Produksi
2	Meningkatnya infrastruktur dasar dan layanan dasar pada masyarakat pesisir dan pulau2 kecil.	Jumlah daerah pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang ekonomi masyarakatnya dibina dan diberdayakan serta mendapatkan layanan infrastruktur (pulau)	3.1 Pembinaan akses berusaha, alternatif pendapatan dan unit usaha 3.2 Fasilitasi penyediaan infrastruktur dasar 3.3 Koordinasi lintas sektor
3	Perlindungan Fungsi Lingkungan dan Penanganan Dampak Lingkungan Hidup	1. Cakupan Luas Kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan 2. Persentase cakupan wilayah pengelolaan perikanan yang terawasi dari kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan 3. Jumlah kasus penyelesaian dan penyidikan tindak pidana perikanan secara akuntabel dan tepat waktu 4. Jumlah Pokmaswas yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan dengan memperhatikan keterwakilan jumlah perempuan dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	2.1 Penata kelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
4	Terjaganya iklim investasi berkualitas yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa	1. Volume ekspor hasil perikanan (ton) 2. Nilai ekspor hasil perikanan (US\$.1000/thn)	3.1.1 Perbaikan mutu dan daya saing 3.1.2 Perluasan pasar ekspor 3.2.1 Peningkatan efisiensi usaha kelautan dan perikanan

*Rencana Strategis Perubahan 2013-2018*

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
5.1	Meningkatnya keterampilan dan inovasi pelaku usaha kelautan dan perikanan	Jumlah tenaga kerja dengan memperhatikan keterwakilan jumlah perempuan dalam melakukan usaha : 1. Perikanan Tangkap 2. Perikanan budidaya 3. Pengolahan 4. Pemasar Ikan 5. Petani Garam	5.1.1 Pembinaan para pelaku usaha kelautan 5.1.2 Kemitraan pelaku dengan sumber inovasi
5.2	Kelembagaan dan Tataaksana Pemerintahan Daerah Yang Kuat dan Transparan dalam mendukung reformasi birokrasi	Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Disiplin Aparatur	1. Analisis Beban Kerja 2. Layanan administrasi kepegawaian
		Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan dan Jasa kantor,	Perbaiki kualitas pelayanan perkantoran
	Pengelolaan keuangan (Pembiayaan, pendapatan dan belanja) yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib	Jumlah pembinaan dan pelayanan pengelola keuangan dan administrasi kantor Dinas Kelautan dan Perikanan	Perbaiki kualitas pelayanan perkantoran
5.3	Meningkatnya kapasitas dan pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan	Persentase kualitas SDM Aparatur dengan memperhatikan keterwakilan jumlah laki-laki dan perempuan pada Dinas Kelautan dan Perikanan	1. Peningkatan kompetensi aparat 2. Pengembangan SDM dan IPTEK kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan dan budaya bahari.
5.4	Perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal	Dokumen perencanaan program kegiatan tepat waktu,	1. Koordinasi dan peningkatan kualitas perencanaan 2. Penyediaan data dan informasi sumberdaya kelautan yang terintegrasi ( <i>one map policy</i> ) dalam rangka mendukung pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut.

**Tabel. 4.4.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>VISI : “Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai pilar utama dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan Masyarakat”</b>			
<b>MISI I : Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Kebijakan</b>	<b>Strategi</b>
Terwujudnya Kualitas Kemakmuran Ekonomi (penguatan kelembagaan dan kesejahteraan sosial) masyarakat pesisir	Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan</li> <li>2. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Minapolitan serta Pengembangan kluster Produksi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan komoditas unggulan berbasis kawasan dan ekonomi kelautan (<i>blue economic</i>)</li> <li>2. Pengendalian mutu lingkungan kawasan dan potensi bencana</li> <li>3. Dukungan permodalan usaha</li> <li>4. Penyediaan bibit/benih bermutu</li> <li>5. Pemantauan dan pengendalian sebaran pathogen secara vertical dan horizontal</li> <li>6. Pembinaan dan pendampingan pelaku usaha</li> <li>7. Penataan kluster pengembangan komoditas unggulan secara terpadu</li> <li>8. Standarisasi input produksi</li> <li>9. Peningkatan investasi usaha kelautan dan perikanan</li> <li>10. Perluasan pasar produk perikanan di dalam dan luar negeri</li> <li>11. Pelibatan peran dan Pengarustamaan Gender</li> </ol>
Tercukupinya akses dan kualitas layanan infrastruktur masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	Meningkatnya infrastruktur dasar dan layanan dasar masyarakat pesisir dan pulau2 kecil.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan</li> <li>2. Fasilitasi penyediaan infrastruktur dasar dan Koordinasi lintas sektor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan unit usaha masyarakat pesisir</li> <li>2. Peningkatan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir</li> <li>3. Pembinaan akses berusaha, alternatif pendapatan dan unit usaha</li> <li>4. Pelibatan peran dan Pengarustamaan Gender dalam penyediaan infrastruktur dasar pada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil</li> </ol>

<b>MISI II : Memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Kebijakan</b>	<b>Strategi</b>
Terjaganya kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	Perlindungan Fungsi Lingkungan dan Penanganan Dampak Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan</li> <li>2. Penatakelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan instrumen kebijakan pengelolaan sumberdaya laut, pesisir, dan pulau kecil secara terpadu</li> <li>2. Pengendalian aktivitas pengelolaan dan pembangunan sesuai daya dukung lingkungan</li> <li>3. Pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil</li> <li>4. Penyadaran masyarakat pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan menerapkan peran Pengarustamaan Gender</li> <li>5. Pengawasan dan penegakan hukum pelanggaran pengelolaan sumberdaya laut, pesisir, dan pulau kecil</li> </ol>
<b>MISI III : Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Kebijakan</b>	<b>Strategi</b>
Terwujudnya peningkatan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global	Iklim investasi berkualitas yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan efisiensi usaha kelautan dan perikanan</li> <li>2. Perbaikan mutu dan daya saing produk kelautan dan perikanan</li> <li>3. Perluasan pasar ekspor</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan ketersediaan sarana dan prasarana produksi bermutu dan terjangkau</li> <li>2. Pengembangan usaha berskala ekonomis</li> <li>3. Pemanfaatan potensi unggulan lokal</li> <li>4. Penataan kelembagaan dan tata kelola usaha dan kelompok masyarakat</li> <li>5. Perluasan dan penguatan kemitraan dengan industri dan pihak terkait</li> <li>6. Diversifikasi produk kelautan dan perikanan</li> <li>7. Ketersediaan informasi pasar produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan</li> <li>8. Standarisasi mutu produk sesuai ketentuan pasar internasional</li> <li>9. Inovasi produksi produk kelautan dan perikanan potensi ekspor</li> <li>10. Ekspor produk kelautan dan perikanan secara langsung (direct) ke negara tujuan</li> <li>11. Pembinaan kontak dagang dengan buyer negara tujuan</li> <li>12. Perluasan kerjasama negara tujuan ekspor produk kelautan dan perikanan</li> </ol>

<b>MISI IV : Mengembangkan SDM Kelautan dan Perikanan dan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Kebijakan</b>	<b>Strategi</b>
5.1. Terwujudnya keberdayaan masyarakat dan kualitas pemerintahan desa	1. Keterampilan dan inovasi pelaku usaha kelautan dan perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Kompetensi Masyarakat KP Melalui Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan</li> <li>Pembinaan para pelaku usaha kelautan dan perikanan</li> <li>Kemitraan pelaku dengan sumber inovasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan kualitas manajemen usaha</li> <li>Diseminasi IPTEK mutakhir usaha kelautan dan perikanan</li> <li>Pengembangan dan penguatan karakter kewirausahaan para pelaku usaha</li> <li>Kemitraan kelompok usaha dengan perguruan tinggi dan balai penelitian atau sumber inovasi</li> </ol>
5.2. Terwujudnya pemerintahan yang baik	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kelembagaan dan Tatalaksana Pemerintahan Daerah Yang Kuat dan Transparan dalam mendukung reformasi birokrasi</li> <li>Pengelolaan keuangan (Pembiayaan, pendapatan dan belanja) yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib</li> <li>Meningkatnya kapasitas dan pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan</li> <li>Perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun budaya kerja yang profesional,</li> <li>Perbaikan kualitas pelayanan perkantoran</li> </ol> <p>Meningkatkan kualitas pengawasan internal,</p> <p>Peningkatan kompetensi aparat</p> <p>Pembangunan sistem perencanaan yang berorientasi pada hasil dan monitoring evaluasi pengelolaan kinerja yang terstruktur;</p>	<p>Standarisasi sistem dan mekanisme layanan publik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan pengelolaan keuangan</li> <li>Pengendalian dan sistem pelaporan keuangan</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan dan kursus para aparat lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan berbasis gender</li> <li>Peningkatan status pendidikan formal aparat</li> <li>Reformasi birokrasi</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan perencanaan Makro, Mikro, PPRG, MDGs, Kemiskinan</li> <li>Koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan</li> </ol>

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki

kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Dengan prioritas kebijakan tersebut bukan berarti program/kegiatan pembangunan operasional SKPD di luar yang diprioritaskan tidak berjalan, tetap berjalan tetapi dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan. Kebijakan Pembangunan dengan penekanan strategis lebih rendah dimaksud adalah program-program operasional pada semua SKPD yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan. Arah kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan selama 5 (lima) tahun Provinsi Sulawesi Selatan periode 2013-2018 adalah sebagai berikut.

**a. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2013**

Pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2013 merupakan transisi dari periode RENSTRA sebelumnya. Fokus pembangunan selain melanjutkan pencapaian pada yang tercantum dalam RPJMD sebelumnya, juga meletakkan dasar-dasar bagi fokus pembangunan Kelautan dan Perikanan saat ini. Kebijakan pembangunan pada tahun 2013 diarahkan kepada:

1. Pengembangan ekonomi kerakyatan:
  - a) Peningkatan produksi perikanan dan rumput laut;
  - b) Pengembangan komoditas garam;
  - c) Pengembangan industri lokal;
  - d) Penumbuhan Wirausaha Baru;
  - e) Penguatan penyuluhan pertanian, kehutanan dan perikanan;
  - f) Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap usaha produktif;
  - g) Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat

**b. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2014**

Tahun 2014 merupakan tahun terakhir dari berlakunya RPJMN 2010-2014. Karena itu, prioritas RPJMN menjadi perhatian. Selain itu, tahun 2014 merupakan tahun demokrasi dan politik, sehubungan dengan pelaksanaan pemilihan legislatif dan presiden, sehingga perhatian juga perlu diberikan terkait hal tersebut. Kebijakan pembangunan tahun 2014 diarahkan kepada:

1. Pembinaan dan pengentasan masyarakat tidak mampu:
  - a) Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap usaha produktif;
  - b) Pemenuhan kebutuhan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
2. Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah:
  - a) Peningkatan kapasitas pelabuhan perikanan;
  - b) Pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat pesisir dan pulau;
  - c) Peningkatan kapasitas penanganan bencana.
3. Reformasi Birokrasi dan Penguatan Governance:
  - a) Penguatan kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan daerah;

- b) Peningkatan kompetensi aparatur ;
- c) Pengembangan transparansi birokrasi;
- d) Penguatan manajemen pembangunan dan pengendalian tata ruang;
- e) Penertiban pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- f) Perbaikan administrasi pemerintahan umum;
- g) Penguatan dukungan pemerintahan kewilayahan.

Selain itu, pengembangan ekonomi kerakyatan, pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan serta pembangunan kesehatan, masih menjadi prioritas pada beberapa arah kebijakannya di tahun ini.

**c. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2015**

Pada tahun 2015 legislatif baru dan kabinet baru mulai berjalan. Karena itu, sebagian dari kebijakan akan menyesuaikan diri dengan arahan dari kabinet baru tersebut. Pembangunan tahun 2015 sebagian masih melanjutkan prioritas tahun 2014 yakni pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah. Selain itu, ditambahkan prioritas baru yakni:

1. Peningkatan kelestarian dan penanganan dampak lingkungan:
  - a) Perlindungan fungsi lingkungan;
  - b) Penanganan dampak lingkungan;
  - c) Konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis;
  - d) Antisipasi perubahan iklim.
2. Pengembangan Kerjasama Daerah dan Daya Saing daerah:
  - a) Pengembangan kerjasama Provinsi Sulawesi Selatan dengan Provinsi Luar Negeri;
  - b) Pengembangan kerjasama Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota lain di Indonesia dan Luar Negeri;
  - c) Pengembangan sistem jaringan distribusi komoditas strategis;
  - d) Penguatan sistem inovasi daerah;
  - e) Pengembangan dukungan MP3EI dan BKPRS.

**d. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2016**

Pada tahun 2016 seluruh pembangunan diarahkan untuk mengkselerasi capaian kinerja seluruh kebijakan yang telah dijalankan pada tiga tahun sebelumnya. Selain itu, juga dilakukan penyesuaian sebagai respons terhadap perubahan lingkungan strategis regional, nasional maupun global.

**e. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2017**

Pada tahun 2017 prioritas diberikan kepada kebijakan-kebijakan yang target kinerjanya masih jauh dari pencapaian. Sementara kebijakan yang target kinerjanya sudah mendekati pencapaian maka percepatan dilakukan untuk menuntaskan pencapaian tersebut.

**f. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2018**

Tahun 2018 merupakan tahun terakhir dari periode RPJMD 2013-2018. Pada tahun tersebut akan terselenggara pemilihan Gubernur secara bersamaan dengan beberapa kabupaten/kota. Karena itu, kebijakan terkait ketertiban dan demokrasi kembali menjadi prioritas pada tahun 2018. Selain itu, prioritas juga diberikan kepada target kinerja kebijakan yang belum tercapai pada tahun 2017.

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN**  
**DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Program Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program per pagu sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, yang selanjutnya dijabarkan Dinas Kelautan dan Perikanan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan.

**5.1 Perumusan rencana program kegiatan**

Untuk melaksanakan kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan selama periode 2013 – 2018, maka ditetapkan tema dalam melaksanakan program kegiatan berdasarkan perwujudan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kelautan dan Perikanan. Upaya pencapaian pelaksanaan pembangunan dituangkan dalam tema yaitu :

Tahun 2014

Tema : “Peningkatan produksi perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat”

Tahun 2015

Tema : “Peningkatan Usaha Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui Pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah”

Tahun 2016

Tema : “Akselerasi Peningkatan Usaha Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan serta Penyesuaian terhadap Perubahan lingkungan strategis”

Tahun 2017

Tema : “Percepatan Peningkatan Usaha Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui penguatan koordinasi daerah”

Tahun 2018

Tema :” Melanjutkan Percepatan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing berbasis pengembangan kawasan strategis dan kelestarian lingkungan ”

Tema tersebut diatas merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan Visi dan Misi untuk mencapai tujuan dan sasaran RENSTRA dengan efektif dan efisien. Penetapan tema dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran. Sehingga dalam lima (5) tahun, arsitektur perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan dipisahkan menjadi dua: (1) perencanaan strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi-misi pembangunan daerah; (2) perencanaan operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan setiap urusan. Adapun pelaksanaan Misi berdasarkan Tema tersebut adalah sebagai berikut :

**a) Misi I :**

**Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

Tujuan : - Meningkatkan kemakmuran ekonomi  
- Meningkatkan kesejahteraan sosial  
- Meningkatkan akses dan kualitas layanan infrastruktur

Sasaran : - Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan  
- Tercukupinya infrastruktur dasar dan layanan dasar masyarakat pesisir dan pulau2 kecil.

Didukung oleh program :

**1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan**

Indikator Program :

- a. Produksi Perikanan Budidaya tahun 2013 sebesar 2.391.769 ton menjadi 4.599.528 ton pada tahun 2018
- b. Nilai Produksi Perikanan Budidaya Rp. 5.70 Trilyun tahun 2013 menjadi Rp.13.24 Trilyun tahun 2018
- c. Jumlah tenaga pembudidaya (orang) sebanyak 289.847 orang tahun 2013 menjadi 510.809 orang
- d. Nilai Tukar Pembudidaya sebesar 107,7 tahun 2013 menjadi 108,5 tahun 2018

Program ini diarahkan untuk peningkatan produksi dan mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 yaitu **Penguatan Paket Bibit Perikanan** sebesar 100.000 paket sampai tahun 2018. Adapun tujuan program adalah (1) Peningkatan Pendapatan, (2) Penyerapan Tenaga Kerja melalui usaha perikanan budidaya. Selain itu komoditas udang, bandeng dan rumput laut tetap menjadi komoditas unggulan sehingga perlu digalakkan dalam rangka peningkatan produksi budidaya.

Sasaran produksi yang akan dicapai pada tahun awal kondisi yakni tahun 2013, sebesar 2.371.584,2 ton dan dengan kondisi akhir tahun 2018 sebesar 3.150.040 ton. Adapun produksi komoditas unggulan pada tahun awal kondisi tahun 2013, untuk komoditi udang 33.200 ton, Bandeng 91.502,3 ton dan rumput laut 2.233.259,7 ton (*Gracillaria spp* 654.920,7 ton dan *Eucheuma spp* 1.578.339 ton). Program tersebut diarahkan untuk menumbuh kembangkan industri strategis perikanan di Sulawesi Selatan dengan prioritas usaha adalah agroindustri dan industri yang memiliki keterkaitan industri/pasar didaerah lain termasuk luar negeri, melalui usaha ini akan memicu laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Komoditas yang dikembangkan adalah komoditas yang bertumbuh pada potensi yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal seperti Rumput Laut, Udang dan Bandeng. Dalam rangka pengembangan komoditas unggulan dan komoditas lain perlu diperhatikan berbagai upaya salah satunya yaitu penguatan kelembagaan, akses permodalan dan perluasan jejaring dan kemitraan.

## **2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

Indikator Kinerja :

- a. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 292.237.6 ton tahun 2013 menjadi 307.145 ton tahun 2018
- b. Nilai Produksi Perikanan Tangkap Rp.4.34 Trilyun tahun 2013 menjadi Rp. 4.57 Trilyun tahun 2018
- c. Jumlah tenaga kerja Nelayan (orang) sebanyak 114.705 orang tahun 2013 menjadi 120.191 orang tahun 2018
- d. Jumlah tenaga kerja Nelayan Perairan Umum (orang) sebanyak 13.906 orang tahun 2013 menjadi 14.980 orang tahun 2018
- e. Nilai Tukar Nelayan sebesar 102,8 tahun 2013 menjadi 104,1 tahun 2018

Program ini diarahkan pada optimalisasi pengembangan usaha perikanan tangkap berkelanjutan merupakan upaya revitalisasi dan perbaikan orientasi pembangunan perikanan

berkelanjutan dengan menekankan pada tiga aspek kajian yang merupakan dasar pertimbangan arahan kebijakan dalam melahirkan program dan kegiatan, meliputi:

- 1) Inovasi dan pengembangan teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan,
- 2) Pendalaman pengetahuan dan pemahaman terhadap target tangkapan, dan
- 3) Pengenalan dan penguasaan karakteristik daerah penangkapan ikan.

Ketiga aspek kajian ini merupakan ruang lingkup pengembangan dan pembangunan perikanan tangkap yang menentukan keberhasilan dan tingkat produktifitas unit usaha. Kajian teknologi penangkapan ikan (*fishing technology*) lebih diarahkan pada peningkatan produktifitas penangkapan sebagai target pencapaian dengan indikator kinerja diarahkan pada efektifitas dan efisiensi upaya penangkapan ikan yang dilakukan. Bagian dari ruang lingkup kajian ini meliputi:

- a) Penerapan teknologi penangkapan ikan berbasis potensi ruang dengan menetapkan komoditas unggulan sebagai target tangkapan,
- b) Pemanfaatan teknologi alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon, cahaya, umpan, dan resonansi suara
- c) Penanganan dan pengendalian teknologi penangkapan ikan yang overfishing dan tidak ramah lingkungan (*destructive fishing*) melalui pengelolaan jumlah dan jenis alat tangkap, pengaturan ukuran mata jaring untuk selektifitas target tangkapan, dan pembatasan daerah operasi penangkapan ikan pada zona terlarang.

Gambaran umum potensi pembangunan perikanan tangkap Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tiga karakteristik wilayah pesisir yang khas/spesifik, yaitu perairan wilayah pesisir Teluk Bone, wilayah pesisir Laut Flores, dan wilayah pesisir Selat Makassar. Ketiga karakteristik wilayah perairan ini seharusnya mampu dioptimalkan pemanfaatannya sebagai potensi yang sangat besar dan luar biasa dalam mengakselerasi pembangunan perikanan tangkap. Kajian ikan target tangkapan (*fish target*) dan daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) dititikberatkan pada analisis entitas dan potensi ruang yang ditetapkan sebagai daerah penangkapan ikan sebagai wilayah kajian dengan segala potensi sumberdaya ikan yang terkandung didalamnya. Ruang lingkup kajian target tangkapan akan mendeskripsikan produksi dan potensi sumberdaya ikan yang berada pada suatu daerah penangkapan ikan melingkupi komposisi jenis, ukuran ikan, jumlah hasil tangkapan sebagai total produksi dan jumlah stok sumberdaya ikan, ekosistem dan habitat keberadaan target tangkapan, dan tingkah laku ikan target tangkapan. Pengetahuan dan pemahaman tingkah laku ikan target tangkapan terhadap penguasaan karakteristik daerah penangkapan merupakan acuan dasar dan basis pengembangan teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Diperlukan manajemen pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan, baik yang bersifat teknis pada teknologi penangkapan ikan maupun yang bersifat manajemen dalam pengelolaan base-line data secara sistematis dan terstruktur dari waktu ke waktu untuk memperbaiki dan mengembangkan kondisi eksisting yang telah dicapai.

**3. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Konservasi sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

Indikator Kinerja :

- a. Volume produksi garam rakyat 195.403 ton tahun 195.403 ton tahun 2013 menjadi 267.887 ton tahun 2018.
- b. Jumlah Pulau- Pulau Kecil yang ekonomi masyarakatnya diberdayakan tahun 2013 sebanyak 2 pulau menjadi 12 pulau sampai tahun 2018.
- c. Luas

Program ini diarahkan pada pengembangan pengembangan dan pengelolaan wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu program yang mendukung penanganan kemiskinan dan kesejahteraan nelayan. Perubahan social ekonomi di desa-desa pesisir atau desa nelayan telah memperjelas garis stratifikasi social masyarakatnya. Nelayan kecil merupakan lapisan yang paling banyak jumlahnya dimana mereka hidup dalam taraf kemiskinan dan tekanan-tekanan social ekonomi yang berakar pada faktor-faktor kompleks yang saling terkait. Adapun salah satu strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yaitu meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan.

**b) Misi II :**

**Memelihara Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

Tujuan : - Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam

Sasaran : - Meningkatnya Perlindungan Fungsi Lingkungan dan Penanganan Dampak Lingkungan Hidup

Didukung oleh program :

**1. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Konservasi sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

Indikator Kinerja :

- a. Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan dari 838.260 Ha menjadi 1.350.019 Ha pada tahun 2018

Program diarahkan pada upaya pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya agar dapat menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan

meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Usaha tersebut sebagai perwujudan bagi Sulawesi Selatan sebagai Entitas Sosial Ekonomi yang berkeadilan. Tujuan yang dapat dicapai adalah untuk meningkatkan daya tarik wilayah terhadap investor termasuk kunjungan wisata dan sekaligus juga dapat memberi iklim yang kondusif bagi Sulawesi Selatan dalam pengembangan kegiatan konservasi sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

## **2. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

Indikator Kinerja :

- a. Cakupan kasus illegal Fishing dan Penggunaan bahan yang merusak yang dapat diproses melalui Jalur Hukum 10 Kasus sampai pada tahun 2018
- b. Jumlah Pokmaswas yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan dari 110 kelompok pada tahun 2013 menjadi 160 kelompok sampai pada tahun 2018

Program ini diarahkan untuk memelihara dan melindungi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan, terutama Sumberdaya yang telah mengalami degradasi tingkat produktivitasnya. Upaya yang dapat dilakukan dalam mendukung program yaitu melalui pemberdayaan masyarakat dalam memelihara dan melindungi sumberdaya perikanan dan kelautan dengan membentuk sistem pengawasan berbasis masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pengawasan khususnya untuk pengawasan destructive fishing, illegal fishing, pengamanan sumberdaya ikan dan lingkungan, penataan dan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana perikanan. Program ini juga diarahkan untuk penguatan kelembagaan organisasi masyarakat lokal sebagai upaya strategis dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dengan meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Usaha yang dapat dilakukan dalam mendukung kegiatan yaitu :

- ✦ Sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan terhadap larangan penggunaan bahan dan alat tangkap yang dapat merusak sumberdaya perikanan.
- ✦ Intensifikasi pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan bahan terlarang untuk penanganan hasil perikanan
- ✦ Pelatihan kesadaran masyarakat dalam rangka pengendalian kerusakan lingkungan sumberdaya perikanan
- ✦ Menumbuh kembangkan kelompok – kelompok masyarakat Pengawas Perikanan di setiap daerah
- ✦ Himbauan dan larangan terhadap pengambilan terumbu karang dan biota - biota tertentu yang dianggap telah hampir punah.

Melalui usaha tersebut diatas, maka diharapkan tingkat kerusakan sumberdaya perikanan dan kelautan berkurang dan terjadi peningkatan produktivitas tangkapan ikan.

**c) Misi III :**

**Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**

Tujuan : - Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global

Sasaran : - Terjaganya iklim investasi berkualitas yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa

Didukung oleh program :

**1. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan**

Indikator Kinerja :

- a. Jumlah Ekspor hasil perikanan 98.276 ton tahun 2013 menjadi 164.945 ton pada tahun 2018
- b. Nilai Ekspor hasil perikanan 221.000 US\$ (1.000) tahun 2013 menjadi 353.427 US\$ (1.000) pada tahun 2018

Program ini diarahkan untuk peningkatan nilai tambah melalui peningkatan mutu dan jenis olahan hasil perikanan, usaha ini akan menciptakan peningkatan dan pemerataan pendapatan khusus para pelaku usaha olahan hasil perikanan. Tujuan pemasaran akan tercapai melalui usaha (1) Peningkatan sumberdaya manusia dalam hal ini adalah pelaku usaha, (2) Peningkatan sarana olahan dan kelembagaan usaha, (3) Peningkatan informasi pasar, (4) Peningkatan ketersediaan bahan baku olahan. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapaistas usaha terhadap industri – industri Pengelolaan Hasil Perikanan di Sulawesi Selatan sehingga dapat menjadi pusat pelayanan dari industri – industri yang ada didaerah atau diluar provinsi. Industri yang dimaksud yaitu industri pengolahan rumput laut, udang dan ikan.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka, ditempu pelayanan prima berupa a. Intensifikasi pengujian mutu, b. Intensifikasi terhadap informasi pasar dan persyaratannya, c. Pembinaan dan pengawasan penerapan standarisasi terhadap produk perikanan. Program ini juga diarahkan meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan

**d) Misi IV :**

**Mengembangkan SDM Kelautan dan Perikanan serta tata pemerintahan yang baik**

Tujuan : - Mewujudkan keberdayaan masyarakat dan kualitas pemerintahan desa

- Mewujudkan pemerintahan yang baik

Sasaran :

- Meningkatnya keterampilan dan inovasi pelaku usaha kelautan dan perikanan
- Terwujudnya Kelembagaan dan Tatalaksana Pemerintahan Daerah Yang Kuat dan Transparan dalam mendukung reformasi birokrasi
- Terwujudnya pengelolaan keuangan (Pembiayaan, pendapatan dan belanja) yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib
- Terwujudnya peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan
- Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal

Program teknis yang mendukung pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan didukung oleh program :

**Program Pengembangan Budidaya Perikanan**

Indikator Kinerja : a. Jumlah pembudidaya yang mengikuti kegiatan pengembangan kualitas SDM sebanyak 3.000 orang tahun 2013 menjadi 4.000 orang tahun 2018 dengan memperhatikan jumlah keterwakilan perempuan dan laki-laki.

**1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

Indikator Kinerja : a. Jumlah nelayan laut dan perairan umum yang mengikuti kegiatan pengembangan kualitas SDM sebanyak 150 orang tahun 2013 menjadi 500 orang tahun 2018 dengan jumlah keterwakilan perempuan 30% dan laki-laki 70%

**2. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan**

Indikator Kinerja : a. Jumlah pengolahan dan pemasar yang mengikuti kegiatan pengembangan kualitas SDM sebanyak 400 orang tahun 2013 menjadi 600 orang tahun 2018 dengan memperhatikan jumlah keterwakilan perempuan 70% dan laki-laki 30%.

**3. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Konservasi sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

Indikator Kinerja : a. Jumlah jenis usaha yang dikembangkan masyarakat 10 jenis sampai tahun 2018

Sedangkan untuk pengembangan SDM Aparat dan Tata Pemerintahan yang baik didukung oleh program yang dilaksanakan oleh bidang sekretariat yaitu :

**Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya dan Disiplin Aparatur**

Indikator Kinerja :

- a. Persentase kualitas SDM Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan 20% per tahun

Program ini diarahkan untuk peningkatan budaya kerja aparat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dan pelayanan administrasi kepegawaian melalui kegiatan :

- (1) Peningkatan disiplin aparat dan pengembangan kapasitas sumberdaya aparat

Kemudian dalam menunjang sistem dan standar pelayanan publik dan operasional maka didukung oleh program :

**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- Indikator Kinerja:
- a. Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor, pengelolaan keuangan dan administrasi kantor (1 tahun)
  - b. Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Disiplin Aparatur 234 orang sampai tahun 2018
  - c. Pelayanan Administrasi Keuangan setiap tahun

Program yang diarahkan untuk peningkatan kinerja, pelayanan administrasi perkantoran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan melalui usaha :

- Peningkatan sarana dan fasilitas kebutuhan kantor
- Penyediaan jasa pelayanan administrasi keuangan
- Penyediaan jasa pelayanan administrasi kepegawaian
- Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan dan asset daerah

Selanjutnya untuk mewujudkan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal maka diarahkan pada program :

**Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Evaluasi Capaian Kinerja**

Indikator Kinerja :

- a. Persentase dokumen perencanaan program kegiatan yang terintegrasi, tepat waktu dan akuntabilitas kinerja dinas serta laporan tahunan dan statistik 20% per tahun

Program ini diarahkan untuk peningkatan pelayanan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi kegiatan serta pelayanan data dan informasi statistik capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan

## 5.2 Indikator kinerja

Penetapan indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mendukung indikator RPJMD dan Indikator Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

**Tabel 5.1**  
**Alur Pikir Penetapan Indikator Kinerja**

PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN RPJMD 2013 – 2018 :	PENCAPAN SASARAN INDIKATOR RENSTRA2013 – 2018
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan Terhadap Sektor Pertanian dengan kondisi awal tahun 2013 sebesar 31,21% sampai kondisi akhir Tahun 2018 sebesar 45.25 %</b></li> <li>2. <b>Produksi Perikanan kondisi awal tahun 2013 sebesar 2.869.663.1 ton sampai kondisi akhir tahun 2018 sebesar 4.906.672.7 ton</b></li> <li>3. <b>Produksi Komoditi Unggulan Udang kondisi awal tahun 2013 sebesar 34.402.7 ton sampai kondisi akhir tahun 2018 sebesar 47.615 ton, Bandeng kondisi awal tahun 2013 sebesar 91.502.3 ton sampai kondisi akhir tahun 2018 sebesar 240.780 ton dan Rumput Laut kondisi awal tahun 2013 sebesar 2.233.259,7 ton sampai kondisi akhir tahun 2018 sebesar 4.280.366 ton</b></li> <li>4. <b>Konsumsi Ikan dengan kondisi awal tahun 2013 sebesar 44.3 kg/kap sampai kondisi akhir tahun 2018 sebesar 46.5 kg/kap</b></li> <li>5. <b>NTN dan NTPi dengan nilai indeks kondisi awal tahun 2013 NTN sebesar 102.8 sampai kondisi akhir tahun 2018 sebesar 104.1 , NTP sebesar 107.7 sampai kondisi akhir tahun 2018 sebesar 108.5</b></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Volume produksi Perikanan dengan kondisi awal tahun 2013 sebesar 2.869.663.1 ton dengan kontribusi perikanan tangkap sebesar 292.237.6 ton dan perikanan budidaya 2.591.769.1 ton sampai kondisi akhir tahun 2018 produksi perikanan sebesar 4.906.672.7 ton dengan kontribusi perikanan tangkap sebesar 307.144.7 ton dan perikanan budidaya 4.599.528 ton</li> <li>2. Nilai Produksi Perikanan dengan kondisi awal tahun 2013 sebesar Rp.9.4 Trilyun sampai kondisi akhir tahun 2018 sebesar Rp.17.8 Trilyun</li> <li>3. Volume ekspor hasil perikanan dengan kondisi awal tahun 2013 sebesar 98.276 ton sampai kondisi akhir tahun 2018 sebesar 164.945 ton</li> <li>4. Nilai ekspor hasil perikanan dengan kondisi awal tahun 2013 sebesar (US\$.1000) 221.000 sampai kondisi akhir tahun 2018 sebesar (US\$.1000) 353.427</li> <li>5. Konsumsi Ikan Perkapita dengan kondisi awal tahun 2013 sebesar 44,3 kg/kap sampai kondisi akhir tahun 2018 sebesar 46,6 kg/kap</li> <li>6. Jumlah tenaga kerja dengan kondisi awal tahun 2013 sebesar 749.079 orang sampai kondisi akhir tahun 2018 sebesar 1.228.648 Org</li> <li>7. Volume produksi garam rakyat 213.405,7 ton sampai tahun 2018</li> <li>8. Indeks Nilai Tukar Nelayan (NTN) dengan kondisi awal tahun 2013 NTN sebesar 102,8 sampai kondisi akhir tahun 2018 sebesar 104,1 , NTP sebesar 107,7 sampai kondisi akhir tahun 2018 sebesar 108,5</li> <li>9. Cakupan Luas Kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan dengan kondisi awal 838.260,63 Ha sampai kondisi akhir tahun 2018 sebesar 1.350.019,13 Ha</li> <li>10. Jumlah kasus penyelesaian dan penyidikan tindak pidana perikanan secara akuntabel dan tepat waktu 10 kasus</li> <li>11. Jumlah Pokmaswas yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan 160 kelompok sampai tahun 2018</li> <li>12. Meningkatnya pembinaan dan koordinasi perencanaan, penganggaran, monev pembangunan KP 6 Dokumen per tahun,</li> <li>13. Meningkatnya Penatausahaan administrasi perkantoran, peralatan dan perlengkapan, pengelolaan keuangan dan adm kepegawaian dengan rasio pelayanan 20:100</li> </ol>

### **5.3 Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif**

Berdasarkan penetapan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam bentuk rencana aksi untuk mendukung pencapaian visi dan misi maka indikator sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang hendak dicapai selama kurun waktu 5 tahun mendatang rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada lampiran 1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH  
SATUAN KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	TARGET KINERJA					Kelompok Sasaran
					2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya Kualitas Kemakmuran Ekonomi (penguatan kelembagaan dan kesejahteraan sosial) masyarakat pesisir	1 Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan	1 Volume produksi Perikanan budidayav(ton)	1 <b>Program Pengembangan Budidaya Perikanan</b>	2.850.946	3.051.023	3.216.206	3.841.657	4.599.528	Masyarakat Pembudidaya
			2 Nilai Produksi Perikanan (Rp.M)		8.210	8.786	9,261	11.063	13.245	
			3 NTN		107.9	108	108.2	108.3	108.5	
			1 Volume produksi Perikanan Tangkap (ton)	2 <b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	295.160	298.112	301.072	304.104	307.145	Masyarakat Nelayan
			2 Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp.M)		4.390	4.434	4.478	4.523	4.568	
			3 NTPi		103.1	103.3	103.6	103.8	104.1	
2	Tercukupinya akses dan kualitas layanan infrastruktur masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	2 Meningkatkan infrastruktur dasar dan layanan dasar masyarakat pesisir dan pulau2 kecil.	1 Volume produksi garam rakyat (ton)	3 <b>Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Konservasi sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	133.403	142.946	154,593	166,240	177,887	Masyarakat pesisir dan pulau - pulau kecil
			2 Jumlah Pulau- Pulau Kecil yang ekonomi masyarakatnya dibina dan diberdayakan serta mendapatkan layanan infrastruktur (pulau)		4	6	8	10	12	
3	Terjaganya kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam kelautan dan perikanan	3 Perlindungan Fungsi Lingkungan dan Penanganan Dampak Lingkungan Hidup	1 Luas Kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (Ha)	1 <b>Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Konservasi sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	83.825	92.207	101.428	111.571	122.728	Masyarakat pesisir dan pulau - pulau kecil

*Rencana Strategis Perubahan 2013-2018*

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	TARGET KINERJA					Kelompok Sasaran
					2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	12
			3 Jumlah kasus penyelesaian dan penyidikan tindak pidana perikanan secara akuntabel dan tepat waktu (kasus) 4 Jumlah Pokmaswas yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan (kelompok)	2 <b>Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	1	2	2	2	2	Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
					120	130	140	150	160	
4	Terwujudnya peningkatan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global	4 Iklim investasi berkualitas yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa	1 Volume ekspor hasil perikanan (ton ) 2 Nilai ekspor hasil perikanan (US\$.1000/thn )	1 <b>Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan</b>	103.170	142.566	149.665	157.119	164.945	Unit Pengolahan Ikan skala kecil dan menengah
					247,260	311,160	326,660	342.930	353,427	
5a.	Terwujudnya keberdayaan masyarakat dan kualitas pemerintahan desa	1 Keterampilan dan inovasi pelaku usaha kelautan dan perikanan	1 Jumlah tenaga kerja dari usaha pembudidaya (Org) 2 Jumlah tenaga kerja Nelayan (org) 3 Jumlah tenaga Nelayan Perairan Umum (org) 4 Jumlah Tenaga Kerja Pengolah Ikan (org) 5 Jumlah Tenaga Kerja Pengolah Ikan (org)	1 <b>Program Pengembangan Budidaya Perikanan</b> 2 <b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b> 3 <b>Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan</b>	292,892	363,584	407,214	456,080	510.809	Masyarakat Pembudidaya
					114,234	116,870	117,967	119,074	120,191	Masyarakat Nelayan
					14,114	14,326	14,541	14,759	14,980	
					44,011	48,121	58,121	68,121	68,131	Unit pengolahan Ikan Skala Kecil dan Menengah & Pemasar Ikan
					326,285	366,610	406,378	452,118	514,536	
			4 Jumlah Tenaga Kerja Petani Garam (org)	3 <b>Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Konservasi sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	2,155	2,165	2,176	2,187	2,198	Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil

*Rencana Strategis Perubahan 2013-2018*

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	TARGET KINERJA					Kelompok Sasaran	
					2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
5b.	Terwujudnya pemerintahan yang baik	5b1	.Kelembagaan dan Tatalaksana Pemerintahan Daerah Yang Kuat dan Transparan dalam mendukung reformasi birokrasi	1 Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor, pengelola keuangan dan administrasi kantor Dinas Kelautan dan Perikanan	1 <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	20	40	60	80	100	Dinas KP
		5b2.	Pengelolaan keuangan (Pembiayaan, pendapatan dan belanja) yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib	2 Persentase kualitas SDM Aparatur pengelola sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperhatikan keterwakilan jumlah laki-laki dan perempuan	2 <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya dan Disiplin Aparatur</b>	20	40	60	80	100	Aparatur Dinas KP
		5b3	Meningkatnya kapasitas dan pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan	3 Jumlah disiplin dan aparatur pelayanan administrasi kepegawaian (orang)	2 <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya dan Disiplin Aparatur</b>	217	220	225	230	234	Aparatur Dinas KP
		5b4	.Perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal	4 Jumlah dokumen perencanaan program kegiatan yang terintegrasi, tepat waktu, dan akuntabilitas kinerja dinas serta laporan tahunan dan statistik	3 <b>Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Evaluasi Capaian Kinerja</b>	6	6	6	6	6	Dinas KP

**BAB VI**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROPINSI SULAWESI SELATAN YANG MENGACU  
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada RPJMD**

Indikator kinerja Utama (IKU) telah mengalami revisi menyesuaikan perubahan kebijakan pemerintah dan penyesuaian lingkungan strategis. IKU yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan Indikator Sasaran yang termuat dalam RPJMD Perubahan. Revisi IKU ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang tertera dalam lembar halaman berikut.



**PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jl. Bajiminasa No. 12 Telp. 873680 – 854726 Fax. (0411) 858779 Kotak Pos 1062

**M A K A S S A R 9 0 1 2 6**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROPINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 523.a/SK-IKU/X/TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2013-2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dan sebagai tindak lanjut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
- b. bahwa untuk mensinergikan indikator kinerja yang termuat dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2013 dengan dasar pertimbangan perubahan dokumen mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
- c. bahwa berdasarkan Indikator Kinerja yang mendukung Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018;

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
13. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 243);
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 40 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 45,46,47,48,49 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD PPMHP, PPMPT, PPSKI, PPBLP, PPBAT;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018
19. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2099/IX/Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
20. Keputusan Kepala Dinas Nomor 523/X/Tahun 2015 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dictum KESATU yaitu perubahan target selama 5 (lima) tahun (terlampir) dengan indikator sebagai berikut :

1. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perikanan terhadap PDRB Sektor Pertanian;
2. Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;
3. Produksi Komoditi Unggulan
  - a. Udang
  - b. Rumput Laut
  - c. Bandeng
4. Konsumsi Ikan Per Kapita
5. NTN Nelayan dan Pembudidaya
6. Jumlah pulau-pulau kecil yang ekonomi masyarakatnya dibina dan diberdayakan serta mendapat layanan infrastruktur
7. Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan
8. Jumlah kasus penyelesaian dan penyidikan tindak pidana perikanan secara akuntabel dan tepat waktu
9. Jumlah Pokwasmas yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan

KETIGA : Perubahan Indikator Kinerja Utama disusun untuk dilaksanakan pada unit kerja eselon III dan Pelaksana Teknis di bawah tanggung jawab dan kewenangannya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 1 Oktober 2015

KEPALA DINAS ,



**IR. H. ISKANDAR**

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19560716 197910 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Setda Provinsi Sulawesi Selatan
4. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 523.a/SK-IKU/X/TAHUN 2015, Tanggal : 1 Oktober 2015

Tentang : Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel Tahun 2013-2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Awal Tahun 2013	Target					Formulasi Pengukuran	Sumber Data	
					Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	Meningkatnya Produksi Perikanan dan produktivitas perikanan	<b>Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan)</b>									(Jumlah kontribusi PDRB Sektor Perikanan/Jumlah PDRB Kategori A)x100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Statistik</li> <li>Renstra DKP Sulsel 2013-2018</li> <li>Permenagri 54 Tahun 2010</li> </ul>
		a. Jumlah kontribusi PDRB sektor perikanan	%	31,21	33,35	36,02	38,87	41,94	45,25			
		<b>Produksi Perikanan</b>									(Jumlah Produksi Ikan (ton)/Target Daerah (ton))x100%	
		a. Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	292,237.6	295,160.	298,111.6	301,092.7	304,103.6	307,144.7			
		b. Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	2,591,769.1	2,850,946	3,051,023	3,216,206	3,841,657	4,599,528			
		<b>Produksi Komoditi Unggulan</b>									(Jumlah Komoditi Unggulan (ton)/Jumlah Produksi Ikan (ton))x100%	
		a. Jumlah produksi Udang	ton	34,402.7	36,466.9	38,630	41,378	44,369	47,615			
		b. Jumlah produksi Bandeng	ton	91,502.3	96,992.4	123,280	154,140	192,660	240,780			
		c. Jumlah produksi Rumput Laut	ton	2,422,154.2	2,718,868.1	2,866,119	2,995,050	3,576,443	4,280,366	(Jumlah Konsumsi Ikan (kg)/Target daerah (kg))x100%		
		<b>Konsumsi Ikan</b>										
a. Jumlah konsumsi ikan (kap/th)	Kg/kap/th	44.3	44.7	45.2	45.6	46.1	46.5	(Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya/ Target Daerah)x100%				
<b>Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya</b>												
a. Rata-rata Nilai Tukar Nelayan (pertahun)	%	102.8	103.1	103.3	103.6	103.8	104.1					
b. Rata-rata Nilai Tukar Pembudidaya (pertahun)	%	107.7	107.9	108.0	108.2	108.3	108.5					

*Rencana Strategis Perubahan 2013 - 2018*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Awal Tahun 2013	Target					Formulasi Pengukuran	Sumber Data
					Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	<b>Tercukupinya infrastruktur dasar dan layanan dasar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil</b>	Jumlah pulau-pulau kecil yang ekonomi masyarakatnya dibina dan diberdayakan serta mendapat layanan infrastruktur	pulau	2	4	6	8	10	12	(Jumlah pulau-pulau yang ekonomi masyarakatnya dibina dan diberdayakan serta mendapatkan layanan infrastruktur/ Target Daerah)x100%	
3	<b>Meningkatnya kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan</b>	Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	Ha	838.250	83.825	92,207	101.428	111.571	122.728	(Luas Kawasan Konservasi yang dikelola/Target Total Luas Kawasan yang akan dikonservasi (kg)x100%	
		Jumlah kasus penyelesaian dan penyidikan tindak pidana perikanan secara akuntabel dan tepat waktu	Kasus	1	1	2	2	2	2	(Jumlah penyelesaian kasus/Target Daerah)x100%	
		Jumlah Pokwasmas yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan	Kelompok	110	120	130	140	150	160	(Jumlah Pokwasmas yang berperan aktif/Target daerah )x100 %	

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan disusun berdasarkan perubahan lingkungan strategis dan pergeseran kebijakan serta pembangunan. Pelaksanaan Revisi Rencana Strategis memasuki pada tahun ke - 3 dalam pelaksanaan rencana jangka menengah dimana digunakan sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan yang diimplementasikan pada tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan. dalam kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2018.

Dengan melaksanakan Renstra Perubahan ini sangat diperlukan adanya partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan karena akan menentukan suatu keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian Revisi Renstra ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansi merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders dan merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2016-2018 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan - tahapan yang ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berkesinambungan.